



# RPJP

**RENCANA PEMBANGUNAAN JANGKA PANJANG  
KABUPATEN SINTANG  
TAHUN 2006-2025**

## DAFTAR ISI

|                                                                                               | Hal.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Daftar Isi .....</b>                                                                       | <b>i</b>   |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>                                                           | <b>1-1</b> |
| 1.1. Latar belakang .....                                                                     | 1-1        |
| 1.2. Maksud dan Tujuan .....                                                                  | 1-2        |
| 1.3. Landasan Hukum .....                                                                     | 1-3        |
| 1.4. Hubungan RPJP Kabupaten Sintang Dengan<br>Dokumen Perencanaan Lainnya .....              | 1-3        |
| 1.5. Tata Urut .....                                                                          | 1-4        |
| <b>BAB II      KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI<br/>              UMUM DAERAH .....</b> | <b>2-1</b> |
| <b>BAB III     VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN .....</b>                                     | <b>3-1</b> |
| 3.1. Visi .....                                                                               | 3-1        |
| 3.2. Misi .....                                                                               | 3-2        |
| 3.3. Arah Pembangunan Daerah .....                                                            | 3-3        |
| <b>BAB IV     P E N U T U P .....</b>                                                         | <b>4-1</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sintang sebagai pusat kekuasaan Kerajaan Sintang, merupakan daerah yang pertama kali ditemukan oleh Demong Irawan bersama pengikutnya sekitar abad ke 13 (tahun 1262 M). Daerah ini memiliki letak yang strategis karena merupakan pertemuan beberapa sungai besar dan terletak di simpang tiga aliran sungai. Wilayah kerajaan Sintang pada mulanya meliputi Sintang, Tempunak dan Sepauk, kemudian diperluas oleh Jubair I (pimpinan kerajaan ketika itu) hingga ke daerah Melawi yang merupakan penghasil beras dan ternak terbesar pada masa itu. Dengan adanya perluasan wilayah tersebut, perekonomian dan kekuatan kerajaan Sintang semakin bertambah besar.

Setelah adanya perubahan RIS kembali menjadi Negara Kesatuan RI 17 Agustus 1950, seluruh kerajaan di Kalimantan Barat termasuk kerajaan Sintang berubah statusnya menjadi Swapraja. Kemudian setelah kerajaan-kerajaan Kalimantan Barat menyerahkan kekuasaan pada RI, maka kekuasaan Swapraja mulai dihapuskan dan dileburkan ke dalam keresidenan Kalimantan Barat. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan segala urusan pemerintahan terutama dalam kegiatan pembangunan. Kemudian pada masa pemerintahan Orde Baru Swapraja Sintang diubah menjadi Kabupaten Sintang yang dibagi kedalam 18 kecamatan.

Sejak tahun 2003 berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang dimekarkan menjadi dua, yaitu Kabupaten Sintang selaku kabupaten asal dan Kabupaten Melawi. Pemekaran ini tentu saja merubah seluruh paradigma dan asumsi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan. Sebagai contoh, Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Sintang tahun 2000-2005 yang disusun pada tahun 2000, sesungguhnya sudah kurang tepat diimplementasikan sejak terjadinya pemekaran tahun 2003.

Konsekuensi logis dari pemekaran tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong pentingnya melakukan penataan ulang pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sintang dalam suatu dokumen perencanaan. Dilihat dari perspektif waktu-pun, saat ini merupakan momentum yang tepat melakukan penataan ulang karena bersamaan dengan berakhirnya masa berlaku dokumen perencanaan sebelumnya yaitu Renstra Kabupaten Sintang Tahun 2000-2005.

Sementara itu dalam tataran nasional terjadi perubahan sistem politik dan pemerintahan yang salah satunya ditandai dengan ditetapkannya sistem perencanaan pembangunan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN). Substansi UU SPPN tersebut selanjutnya dipertegas dalam Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun secara berjangka meliputi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pada UU SPPN dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, setiap daerah termasuk Kabupaten Sintang diwajibkan menyusun rencana pembangunan di daerahnya untuk kurun waktu 20 tahun ke depan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Dokumen perencanaan ini diharapkan akan mengarahkan setiap daerah untuk dapat mencapai tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah seperti tercantum dalam penjelasan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian RPJP Kabupaten Sintang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Sintang, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Sintang untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2006 hingga tahun 2025.

Dalam penjelasan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu perlu dipertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat-syarat lainnya.

Proses penyusunan RPJP ini terdiri dari 4 (empat) langkah yaitu: langkah pertama adalah penyiapan rancangan RPJP yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi Pemerintahan Daerah memberikan masukan dan komentar terhadap rancangan RPJP yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rancangan RPJP yang dihasilkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG). Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir RPJP untuk ditetapkan menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.

Pengalaman yang didapatkan selama ini, baik ketika masih menyatu dalam Kabupaten Sintang maupun setelah dimekarkan menjadi dua kabupaten, menjadi modal yang berharga dalam proses penyusunan RPJP ini dan dalam menyelenggarakan pembangunan Kabupaten Sintang secara menyeluruh, bertahap dan berkelanjutan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1.2.1. Maksud**

RPJP Kabupaten Sintang sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, ditetapkan dengan maksud memberikan arah bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

### **1.2.2. Tujuan**

Adapun tujuan dari penyusunan RPJP ini adalah untuk menyediakan:

1. Pedoman bagi seluruh jajaran Pemerintahan Daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, sekaligus untuk memudahkan seluruh jajaran Pemerintahan Daerah memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan lima tahunan pembangunan daerah.
2. Pedoman dalam perspektif jangka panjang untuk menentukan arah pembangunan daerah dengan mendasarkan diri pada kondisi riil saat ini.

### **1.3. LANDASAN HUKUM**

Landasan Idiil dari RPJP Kabupaten Sintang ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional UUD 1945, sedang landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### **1.4. HUBUNGAN RPJP KABUPATEN SINTANG DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sintang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Sintang, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Sintang untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2006 hingga tahun 2025. RPJP ini menguraikan tentang kondisi, analisis dan prediksi kondisi umum

daerah berdasarkan proyeksi peluang, ancaman, permasalahan dan keberhasilan. Atas dasar itu ditetapkan arah umum pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan.

Penyusunan RPJP ini mengacu pada arah pembangunan pada RPJP nasional dan RPJP provinsi, selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya seperti:

1. Rencana pembangunan jangka menengah daerah, selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. RPJM tersebut memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
2. Rencana kerja pemerintah daerah, selanjutnya disebut RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah.
3. Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra-SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

## **1.5. TATA URUT**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2025 disusun dalam tata urut sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah

Bab III : Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah

Bab IV : Penutup

## **BAB II**

### **KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH**

#### **KONDISI DAN ANALISIS**

##### **Geomorfologi dan Lingkungan Hidup**

Pada umumnya wilayah Kabupaten Sintang berupa dataran rendah dengan pola *meanders* Sungai Kapuas yang melintas di dataran sekitar danau dan lembah yang lebar, dengan arah timur Laut dan Barat Daya. Lembah ini disebut *intermountain basin* (lembah antar pegunungan) yang dibatasi pegunungan dengan ketinggian mencapai 1.100 meter dari permukaan laut. Di sebelah Barat lembah Sungai Kapuas, terdapat bukit-bukit kecil diantara rangkaian perbukitan bergelombang rendah sampai rangkaian pegunungan yang berbatasan dengan negara bagian Serawak, Malaysia. Kondisi fisiografi di Kabupaten Sintang ini dapat dikelompokkan dalam: Pengangkatan Madi, Pengangkatan Ketungau, Dataran Tinggi yang memanjang dari gunung Condong, *Inselberg* atau bukit terisolasi, Perbukitan bergelombang Melawi dan Ketungau, Dataran Distrik Danau (*Lacustrine*), dan Dataran Alluvial dan Rataan.

Berdasarkan tinjauan kondisi geologisnya, stratigrafi di Kabupaten Sintang tersusun atas Kompleks Semitau, Kompleks Busang, Batuan Gunungapi Betung, Granit Menyukung, Kelompok Selangkai, Kelompok Mandai, Formasi Kantu, Batupasir Tutoop, Formasi Ketungau, Batupasir Haloq, Formasi Ingar, Batupair Dangan, Serpih Silat, Formasi Payak, Formasi Tebidah, Batupasir Sekayam, Batuan Terobosan Sintang, dan endapan Aluvium.

Batuan tertua yang terdapat di Kabupaten Sintang membentuk bagian alas yang berumur Karbon-Trias dan tersingkap disepanjang sebuah tinggian tektonik, pegunungan Semitau dengan arah Barat-Timur melewati bagian tengah.

Wilayah Kabupaten Sintang merupakan wilayah dengan intensitas curah hujan tinggi, karena letaknya di dekat garis khatulistiwa. Berdasarkan hasil analisis data curah hujan dan hari hujan selama 10 tahun, rerata curah hujan bulanan tertinggi sebesar 344,3 mm yang jatuh pada bulan November dengan jumlah hari hujan sebanyak 18 hari, dan curah hujan rerata bulanan terendah sebesar 165.1 mm jatuh pada bulan Juli dengan jumlah hari hujan sebanyak 11 hari. Untuk seluruh Kabupaten Sintang, curah hujan rerata tahunan sebesar 3.235,5 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 194 hari. Namun demikian data curah hujan tahunan tertinggi sebesar 5.142,3 mm yang jatuh diatas Stasiun Penangkar Hujan Baning dengan jumlah hari hujan sebanyak 229 hari, sedangkan curah hujan terendah sebesar 2.359,8 mm yang jatuh d atas Stasiun Penangkar Hujan Tempunak, dengan jumlah hari hujan sebanyak 168 hari dalam setahun.

Berdasarkan kondisi batuan penyusunannya, hampir sebagian besar Kabupaten Sintang tersusun oleh batuan yang relatif kedap air, sehingga tidak mampu menyimpan air tanah dalam jumlah yang cukup. Hal ini dapat diasumsikan bahwa di Kabupaten Sintang miskin akan akuifer (lapisan batuan yang mampu menyimpan dan melalukan air tanah dalam jumlah cukup).

Berdasarkan jenis tanahnya, wilayah kabupaten Sintang didominasi oleh jenis tanah ultisol, alluvial dan gambut. Ultisol dan gambut mempunyai kendala rendahnya kesuburan tanahnya, baik fisik, kimia maupun biologi. Berlawanan dengan tanah ultisol yang padat dengan bobot isi (*bulk density*) tanah  $> 1 \text{ g/cm}^3$ , tanah gambut justru sangat longgar yang bobot isinya sangat rendah yaitu  $0,14\text{-}0,21 \text{ g/cm}^3$ , keduanya mempunyai sifat fisik yang tidak baik bagi usaha pertanian.

Wilayah Kabupaten Sintang mempunyai luas lahan kritis 1.147.053,31 hektar, baik lahan kritis dalam kawasan hutan maupun lahan kritis diluar kawasan hutan, disamping itu juga terjadi kerusakan lingkungan karena penambangan yang kurang bijaksana. Polusi asap yang setiap tahun terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan menyebabkan Kabupaten Sintang dianggap salah satu daerah sumber polusi asap.

### **Perkiraan Peluang**

Berdasarkan kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup Kabupaten Sintang berpeluang untuk mengembangkan potensi daerahnya. Tidak adanya ancaman atau sangat kecilnya ancaman akibat gempa, baik tektonik maupun vulkanik menyebabkan wilayah Kabupaten Sintang relatif stabil dan aman bencana alam, terutama yang bersumber dari lapisan kerak bumi.

Kabupaten Sintang mempunyai variasi batuan, hal ini menyebabkan sumber daya alam yang berasal dari mineral dan energi juga bervariasi, hal ini dapat dilihat beragamnya potensi pertambangan di Kabupaten Sintang

Perbedaan ketinggian dari permukaan laut juga menyebabkan perbedaan suhu dan kelembaban, hal ini menyebabkan perbedaan ekosistem. Perbedaan ekosistem ini menyebabkan bervariasinya pula tumbuhan yang dapat hidup. Perbedaan ekosistem ini menyebabkan Kabupaten Sintang kaya akan keanekaragaman hayati. Tingginya keragaman hayati menyebabkan Kabupaten Sintang merupakan salah satu daerah sumber genetik.

Curah hujan yang merata sepanjang tahun di Kabupaten Sintang menyebabkan daerah ini tidak mengalami kekeringan yang berarti, yang berdampak positif pada perkembangan tumbuhan.

### **Perkiraan Ancaman**

Kabupaten Sintang tersusun oleh batuan yang relatif kedap air, sehingga tidak mampu menyimpan air tanah dalam jumlah yang cukup. Hal ini dapat diasumsikan bahwa di Kabupaten Sintang miskin akan akuifer (lapisan batuan yang mampu menyimpan dan melalukan air tanah dalam jumlah

cukup). Pada musim hujan air dapat terjadi banjir, sedangkan pada musim panas akan terjadi kekeringan.

Didominasinya jenis tanah ultisol menyebabkan wilayah Kabupaten Sintang termasuk wilayah yang kurang subur, baik fisik, kimia, maupun biologi. Pertumbuhan tanaman akan kurang baik apabila tidak diberikan masukan yang cukup dan kontinyu. Secara alami, tanaman yang memerlukan hara yang banyak serta kurang tahan kekeringan akan kurang tumbuh baik pada daerah ini.

Luasnya lahan kritis menyebabkan gangguan keseimbangan lingkungan hidup. Gundulnya hutan mengakibatkan semakin rendahnya kapasitas tanah menahan air. Banjir diprediksi akan sering terjadi dalam waktu yang relatif lama. Disamping itu luasnya lahan kritis menyebabkan terganggunya keseimbangan alam, berkurangnya keanekaragaman hayati, bahkan dikhawatirkan musnahnya spesies-spesies tertentu.

Polusi asap, disamping dapat mengganggu sistem navigasi penerbangan lokal, regional, dan nasional, juga dapat mengganggu navigasi penerbangan internasional, hal ini dapat memperburuk citra Indonesia. Disamping itu asap dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan terutama penyebab infeksi saluran pernapasan.

### **Perkiraan Permasalahan**

Lahan kritis yang luas menyebabkan kendala dalam mengrehabilitasi lahan tersebut. Waktu yang diperlukan untuk merehabilitasi lahan tersebut sangat lama, sedangkan dengan keuangan pemerintah yang terbatas maka usaha rehabilitasi tersebut diperkirakan akan berjalan lambat. Hal ini akan diperburuk lagi apabila luas lahan kritis terus bertambah akibat penebangan liar yang terus berlangsung maupun sebab-sebab lain.

Pengendalian air akibat buruknya sifat tanah juga diperkirakan akan tetap menjadi masalah di Kabupaten Sintang, karena upaya pengendalian ini memerlukan investasi yang sangat tinggi, seperti membuat sistem penampungan air, pembuatan embung untuk daerah pertanian dan lain-lain.

Upaya pemupukan, ameliorasi, dan lain-lain untuk merubah kondisi yang kurang baik dari tanah ultisol akan sulit dilakukan dalam skala yang luas, mengingat usaha tersebut memerlukan biaya dan teknologi yang tinggi.

Polusi asap perladangan berpindah sulit untuk dihilangkan, karena hal tersebut merupakan budaya masyarakat. Disamping itu belum ada teknologi yang sederhana dan murah untuk membersihkan lahan dengan cara tidak membakar. Pencegahan kebakaran hutan juga menghadapi permasalahan baik disebabkan minimnya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, juga disebabkan luasnya wilayah yang akan dipantau.

Pemberantasan pertambangan liar dan penebangan liar mengalami berbagai permasalahan baik kurangnya aparat penegak hukum, hukum yang belum dijunjung tinggi, maupun kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup.

### **Perkiraan Keberhasilan**

Kabupaten Sintang akan berhasil mengatasi kendala bidang geomorfologi dan lingkungan hidup apabila menerapkan kebijakan yang terpadu dan holistik. Usaha pertanian diproyeksikan akan berhasil jika subsektor yang dikembangkan adalah tanaman perkebunan, karena tanaman tersebut relatif mampu hidup pada kondisi yang marginal bila dibandingkan dengan tanaman semusim.

Rehabilitasi lahan kritis akan berhasil jika pemerintah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Masyarakat tidak hanya dituntut untuk tidak merusak lingkungan, tetapi masyarakat harus secara aktif dalam proses pelestarian tersebut.

Polusi asap akan dapat diatasi apabila masyarakat merubah sistem bertaninya, dan upaya pembersihan lahan dilakukan dengan sistem pembakaran terkendali. Upaya tersebut akan lebih baik jika masyarakat juga terlibat secara aktif dalam upaya penanggulangannya.

### **Prediksi Output**

Dengan menganalisis proyeksi peluang, ancaman, masalah, dan keberhasilan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, kondisi geomorfologi wilayah Kabupaten Sintang diperkirakan tidak akan berubah secara berarti. Dengan kondisi geomorfologi demikian, maka perkebunan merupakan kegiatan pertanian yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Disamping itu, kegiatan pertambangan merupakan sektor alternatif yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang, mengingat keragaman dan potensinya yang cukup besar.

### **Demografi**

Permasalahan Pembangunan Kabupaten Sintang dari aspek demografi tidak hanya terbatas pada kualitas, tetapi juga kuantitas penduduk. Kuantitas Penduduk jika dibandingkan dengan luas wilayah, masih tergo;ong sedikit. Ini terbukti dengan angka kepadatan penduduk sebanyak rata-rata 15 jiwa tiap kilometer persegi.

Laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 2000 – 2004 tergolong rendah yaitu rata-rata 1,54% per tahun. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Sintang sebagai ibukota Kabupaten yaitu rata-rata 4,5% per tahun dan pertumbuhan penduduk terendah (rata-rata 0,1% per tahun) terdapat di Kecamatan Dedai.

Penduduk yang mendiami wilayah Kabupaten Sintang hingga tahun 2004, berjumlah 335.418 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 172.173 jiwa (51,3%) dan perempuan sebanyak 163.245 jiwa (48,7%). Penduduk ini tersebar di 14 Kecamatan dan perebarannya belum merata. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Sintang yaitu 51.398 jiwa (14,5%) dan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Binjai yaitu 10.650 jiwa (3,0%).

Dari segi umur, penduduk Kabupaten Sintang tergolong pada penduduk muda. Persentase penduduk 0-14 tahun adalah 35,15 persen, penduduk usia 15 – 64 tahun 62,08 persen dan penduduk usia 65 tahun lebih sebanyak 2,07 persen.

Permasalahan demografi Kabupaten Sintang dari aspek kualitasnya dapat dikaji dari pencapaian tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Tingkat Pendidikan Penduduk Relatif Masih Rendah. Hal ini tercermin dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan menengah. Pada tahun 2004, APK jenjang pendidikan SMP/MTs (44,05%) dan SMA/SMK/MA (28,56%) masih tergolong rendah. Demikian juga halnya dengan APM SMP/MTs = 30,22 dan SMU/SMK/MA = 19,44. Penduduk usia 7 -12 tahun yang tidak sekolah 26,24%, Penduduk usia 13 – 15 tahun dan usia 16 – 18 tahun yang tidak sekolah masing-masing sebanyak 69,78% dan 80,56%.

Angka Buta Huruf penduduk usia 15 tahun keatas 14,63%. Rata-rata Lama Sekolah baru mencapai 5,4 tahun, lebih rendah dibanding Rata-rata Lama Sekolah di Kalbar (6,3 tahun).

Tingkat Keberhasilan Pembangunan Kesehatan Belum Memadai, Angka Kematian Bayi (IMR) pada tahun 2004 sebanyak 35 per 1000 kelahiran hidup (Kalbar = 47 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2003). Angka Harapan Hidup tahun 2004 tercatat sebesar 66 tahun. Angka Kematian Balita cukup tinggi yaitu 55 per 1000 kelahiran hidup. Persentase Balita yang tergolong berstatus gizi buruk dan gizi kurang (Kurang Energi dan Protein) tergolong tinggi yaitu 19,42 tahun 2004. Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2004 sebesar 307/100.000 kelahiran hidup. Angka Kesakitan Demam berdarah 0,035 per mil ; Malaria 44,46 per mil; dan Tingginya pravalensi TBC; Diare dan ISPA.

Meskipun mengalami penurunan, Angka Kelahiran Total (TFR) Kabupaten Sintang masih tergolong tinggi, yaitu 2,25 per wanita usia produktif. Tingkat partisipasi pria dalam ber-KB di Kabupaten Sintang masih sangat rendah. Sampai dengan Agustus 2005 jumlah Pria dalam ber KB baru mencapai 266 dari 58.511 PUS (0,61%).

Masih lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga, Jumlah keluarga miskin (Pra-Sejahtera dan Sejahtera-1 dengan alasan ekonomi) di Kabupaten Sintang pada tahun 2004 sebanyak 19.532 keluarga (25,12%).

Belum tertatanya administrasi kependudukan dalam rangka membangun sistem pembangunan, pemerintah, dan pembangunan yang berkelanjutan. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan tertib administrasinya belum memadai. Demikian pula, bank data sebagai data basis kependudukan belum tersedia.

Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, penduduk perempuan berusia 10 tahun lebih yang bekerja pada umumnya (78,70%) berpendidikan rendah. Angka pengangguran terbuka kaum perempuan mencapai 49,29%. Jumlah perempuan yang berstatus Pegawai Daerah sebanyak 354 orang (22,42%) dan yang berstatus Pegawai Pusat sebanyak 163 orang (29,00%). partisipasi perempuan dalam partai politik (anggota DPRD) hanya 6,1%.

### **Perkiraan Peluang**

Peluang Kabupaten Sintang untuk menambah jumlah penduduk adalah dengan cara meningkatkan kapasitas pembangunan guna meningkatkan migrasi masuk dari berbagai daerah luar Kabupaten Sintang. Selain itu Program Transmigrasi Terpadu terus dikembangkan, khususnya untuk daerah-daerah yang jumlah penduduknya relative sedikit.

Untuk kurun waktu 20 tahun mendatang, pembangunan kependudukan di Kabupaten Sintang diperkirakan akan menghasilkan manusia-manusia berkualitas tinggi, cerdas, sehat, produktif, inovatif dan profesional disertai dengan moralitas yang tinggi. Hal ini dimungkinkan dengan terciptanya kesatuan visi dan misi di bidang pendidikan dan kesehatan di kalangan stakeholders dengan motto pendidikan dan kesehatan sepanjang hayat (*education and healthy for long life*). Peluang untuk meningkatkan intensitas pembangunan sumberdaya manusia pada masa yang akan datang didukung dengan Kebijakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ; Pengadaan dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk semua jenjang ; Rekrutmen Guru Baru berdasarkan Kompetensi dan Pemerataan Penempatan Guru ke seluruh wilayah Kabupaten ; Terbentuknya Dewan Sekolah dan Komite Sekolah sebagai wujud dari Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ; Tersedianya Anggaran Pendidikan yang Memadai (20% dari APBN dan 20% dari APBD) ; Peningkatan dan Pengembangan Kemampuan RSUD ; Pengadaan dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Kesehatan secara merata ke seluruh wilayah Kabupaten ; Penambahan jumlah tenaga kesehatan dan persebarannya ke seluruh wilayah Kabupaten ; Meningkatnya sikap “sadar sehat” di kalangan masyarakat ; Meningkatnya Keluarga yang melaksanakan KB secara mandiri ; Meningkatnya Kesadaran Remaja dan Perempuan tentang Kesehatan dan hak-hak reproduksi; Tersedianya Perangkat Hukum untuk melindungi perempuan dan anak ; Meningkatnya kualitas pengetahuan dan keahlian serta peran perempuan dan pemuda dalam berbagai sector pembangunan

### **Perkiraan Ancaman**

Walaupun diperkirakan pembangunan kependudukan akan berjalan lancar bukan berarti tidak ada ancaman-ancaman yang akan timbul dalam proses pembangunan tersebut. Ancaman-ancaman yang diperkirakan akan dihadapi dalam proses pembangunan kependudukan antara lain adalah: Pertambahan penduduk melalui Program Transmigrasi yang kualitasnya relatif rendah ; eksklusivisme etnis dan daerah asal ; Inkonsistensi penerapan Sistem Pendidikan Nasional ; Kesenjangan Kualitas Tenaga Pengajar dan Peserta didik antar daerah ; Tidak terlaksananya Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan, Kesehatan, KB dan Perempuan; Sulitnya memenuhi anggaran minimal untuk pembangunan Pendidikan, Kesehatan, KB dan Perempuan ; Sulitnya mendeteksi timbulnya virus penyakit-penyakit baru dan mengatasinya ; Bencana Alam akibat ulah manusia yang “membangun dengan merusak alam” ; Mencuatnya sikap dan sifat individualis.

### **Perkiraan Permasalahan**

Keberhasilan pembangunan kependudukan jika tidak diimbangi dengan kemajuan pembangunan ekonomi dan pendidikan akan menimbulkan masalah baru yaitu migrasi manusia-manusia cerdas, produktif, sehat dan profesional ke daerah/wilayah yang memberikan harapan lebih (*Brain Migration*). Masalah-masalah lain yang diperkirakan muncul berkaitan dengan kejiwaan (psikologi) seperti meningkatnya penyakit-penyakit masyarakat kota (*urban society diseases*) seperti stress, sikap individualistik, konsumeristik, seks bebas (*free sex*) ; kumpul kebo, NAPZA

### **Perkiraan Keberhasilan**

Keberhasilan pembangunan kependudukan tampak dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*), Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Index*) dan Ukuran Pemberdayaan Perempuan (*Gender Empowerment Gender*), dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sintang. Hak-hak dasar penduduk di bidang pendidikan dan kesehatan terpenuhi. Penduduk Bebas Buta Aksara dan rata-rata lama sekolah meningkat hingga mencapai 12 tahun. Usia Harapan Hidup mencapai 74 tahun.

### **Prediksi Output**

Permasalahan Demografi Kabupaten Sintang “Kuantitas Penduduk Sedikit, Kualitas Penduduk Rendah” akan teratasi melalui peningkatan kapasitas pembangunan di semua sector menjadi “Kuantitas Penduduk Bertambah Banyak sekaligus Kualitas Penduduk Bertambah Tinggi”. Jumlah penduduk Kabupaten Sintang pada tahun 2025 yang akan datang diperkirakan mencapai **438.792** jiwa (asumsi : rata-rata pertumbuhan penduduk 1,54% per tahun) dan persebarannya semakin merata melalui penataan Program Transmigrasi,. Keberhasilan Pembangunan Keluarga Berencana dan Kesehatan akan mengubah struktur penduduk dari penduduk muda menjadi penduduk usia tua yang ditandai dengan penurunan proporsi penduduk usia 0 – 10 tahun dan peningkatan proporsi penduduk usia 55 tahun lebih (manula).

### **Ekonomi dan Sumber Daya Alam**

Struktur perekonomian Kabupaten Sintang selama ini didominasi sektor pertanian, dengan kontribusi sebesar 48,16 % selama tahun 2000-2004. Sektor lain yang memberi kontribusi cukup tinggi diantaranya adalah; sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 23,14 %, sektor jasa-jasa sebesar 7,02 %, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 5,54 %, dan sektor industri pengolahan sebesar 5,13 %.

Kinerja perekonomian daerah yang tercermin pada laju pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 3,41 % selama periode 2001-2004, pada satu sisi merupakan suatu keberhasilan yang memadai. Pertumbuhan ekonomi tersebut telah mendorong peningkatan PDRB perkapita dari sekitar Rp 1,13 juta (harga konstan) pada tahun 2000 menjadi sekitar Rp 1,17 juta (harga

konstan) pada tahun 2004. Meningkatnya PDRB per kapita menjadikan penduduk miskin menurun, dari 17,25 % tahun 2003 menjadi 16,64 % Tahun 2004. Angka pengangguran terbuka tahun 2003 sebesar 17,25 %.

Namun pada sisi lain, kemajuan perekonomian daerah belum diikuti dengan kemajuan pada industri pengolahan (agroindustri) serta industri kerajinan dan industri kecil menengah, yang sampai saat ini belum memberikan peran yang berarti. Produk daerah yang dikategorikan sebagai produk unggulan masih hanya sebatas harapan/keinginan. Demikian pula halnya dengan kegiatan dunia usaha, perdagangan dan UMKM, yang aktivitasnya masih dalam lingkup yang relatif terbatas. Sebagian besar kegiatan perdagangan dan UMKM di Kabupaten Sintang merupakan usaha skala mikro dan usaha kecil.

Sementara itu, sumber daya alam Kabupaten Sintang sampai tahun 2003 memiliki potensi yang besar, diantaranya tanaman padi (24.165 Ha), padi ladang (26.927 Ha), jagung (4.133 Ha), dan kedelai (121 Ha). Sedang potensi perikanan meliputi perairan umum seluas 200.000 Ha. Tanaman perkebunan yang potensial meliputi: karet (88.120 Ha), kelapa dalam (1.447 Ha), kelapa hibrida (948 Ha), kelapa sawit (44.607 Ha), lada (1.008 Ha), kopi (517 Ha), kakao (2.382 Ha), dan aneka tanaman (2.766 Ha). Hingga tahun 2004, luas hutan sekitar 2.237.205,90 Ha, meliputi hutan lindung (680.523,30 Ha), taman nasional (119.948,40 Ha), hutan produksi terbatas (1.012.780,20 Ha), hutan produksi tetap/biasa (419.264,40 Ha), dan hutan konversi (4.680,60 Ha).

Potensi pertambangan mencakup 17 jenis bahan tambang/galian yang tersebar di beberapa kecamatan, mencakup potensi emas (2.384 Ha), Mika (2.250 Ha), Andesit (625 Ha), Basalt (2.500 Ha), kaolin (20 Ha), granit (100 Ha), dan batu bara (91.330 Ha).

### **Perkiraan Peluang**

Perkembangan dan kemajuan perekonomian kabupaten sekitar termasuk perekonomian Kota Pontianak diperkirakan tetap menjadi kawasan yang berpengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Sintang karena merupakan tujuan utama perdagangan sekaligus sumber penanaman modal. Selain itu, perekonomian negara bagian Sarawak di Malaysia yang memiliki perbatasan darat secara langsung dengan Kabupaten Sintang, sehingga akan mendorong terjadinya peningkatan lalu lintas barang, modal, dan tenaga kerja.

Dalam jangka pendek dan menengah, kecenderungan modal akan mengalir ke Kabupaten Sintang manakala iklim investasi semakin kondusif di daerah ini. Kecenderungan ini menuntut upaya yang serius untuk membangun infrastruktur dan melakukan pembenahan di sektor riil dalam upaya meningkatkan daya tarik investasi dan daya saing perekonomian Kabupaten Sintang.

Di lain pihak, sumber daya alam diperkirakan masih tetap menjadi kontributor yang besar dalam struktur perekonomian Kabupaten Sintang. Pengembangan pertanian dalam arti yang luas masih sangat memungkinkan karena masih banyak lahan yang berpotensi untuk

dikembangkan belum dimanfaatkan secara optimal. Sektor pertambangan dan energi masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Eksploitasi batubara yang terkendali diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kabupaten Sintang di masa mendatang. Kebijakan pemerintah daerah untuk menghutankan 30 persen dari total wilayah diperkirakan tidak saja dapat menjaga kelestarian lingkungan, akan tetapi juga dapat meningkatkan hasil produksi hutan non kayu.

### **Perkiraan Ancaman**

Dalam jangka panjang, perekonomian daerah menghadapi tantangan berat untuk menjaga kesinambungan pembangunan secara berkelanjutan. Tantangan terutama menyangkut pembenahan sektor riil yang belum sepenuhnya pulih serta masih rendahnya investasi, terutama investasi swasta. Rendahnya investasi mengakibatkan tertekannya pertumbuhan sektor industri. Indikasi ini tampak pada sektor industri yang pada tahun 2003 tumbuh sekitar 9,65 %, dan dibandingkan tahun sebelumnya ternyata pertumbuhan sektor industri menunjukkan trend penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tantangan berat lainnya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi agar tercipta lapangan kerja yang lebih besar, sekaligus untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Berkenaan dengan kemungkinan timbulnya gejolak ekonomi baik yang berasal dari luar Provinsi maupun luar Kabupaten yang dapat mempengaruhi ketidakseimbangan eksternal dan ketahanan fiskal, maka fenomena demikian perlu dicermati untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. .

Sementara itu, sumber daya alam yang tidak dikelola secara baik dan hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, akan menjadi ancaman dalam pengelolaan SDA jangka panjang. Tambahan pula, kemampuan dan kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah dapat menyebabkan rendahnya efisiensi dan daya saing pemanfaatan sumberdaya alam. Upaya untuk merehabilitasi lahan kritis seluas 1.147.053,31 hektar di Kabupaten Sintang dapat terhambat karena kemampuan keuangan pemerintah daerah yang terbatas. Sementara itu, industri yang kurang berkembang dapat berdampak terhadap rendahnya efisiensi dan nilai tambah produk yang berbasis sumber daya alam.

Kondisi demikian menjadikan pembangunan ekonomi untuk 20 tahun mendatang perlu untuk mengantisipasi perubahan tatanan perekonomian daerah dan ketersediaan SDA. Pengembangan sektor-sektor ekonomi akan sedikit terganggu manakala infrastruktur ekonomi dan sosial serta kebijakan Pemda tidak berorientasi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan investasi. Dampaknya, daya ungkit (leverage) sektor dan pengembangan dunia usaha akan terganggu. Semakin membaiknya daya saing kabupaten/kota lain di Kalbar dan luar propinsi lainnya bila tidak diimbangi dengan peningkatan daya saing ekonomi daerah juga menjadi tantangan dan ancaman jangka panjang manakala SDA tidak dikelola secara arif dan bijak untuk kepentingan pembangunan ekonomi daerah maupun kebutuhan generasi mendatang.

### **Perkiraan Permasalahan**

Perekonomian Kabupaten Sintang sesungguhnya masih sangat rentan terhadap fluktuasi gejolak perekonomian. Peningkatan sektor riil di Kabupaten Sintang diakui masih belum optimal, disebabkan rendahnya kinerja investasi dan belum meluasnya kegiatan ekonomi produktif. Meskipun rata-rata pertumbuhan sektor industri masih di atas rata-rata sektor lainnya, namun beberapa tahun terakhir ini terjadi trend penurunan pada sektor industri pengolahan. Pertumbuhan sektor industri pengolahan tahun 2004 sebesar 8,87 % dan lebih rendah dibandingkan tahun 2003 yang tumbuh 9,65 %.

Di lain pihak, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) termasuk masih memiliki akses terbatas terhadap sumber-sumber pembiayaan modal dan pendanaan usaha. Padahal pelaku ekonomi ini merupakan bagian terbesar dari kegiatan usaha masyarakat yang turut memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian Kabupaten Sintang.

Selanjutnya, keberagaman sumberdaya alam dan lahan yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal. untuk peningkatan hasil produksi pertanian, perkebunan, dan pertambangan/energi. Sementara, efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam masih rendah terutama untuk mendukung pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan tanaman pangan termasuk kegiatan industrialisasi. Permasalahannya sebagian dikarenakan sumberdaya alam lokal belum sepenuhnya direhabilitasi akibat pengelolaan yang tidak terarah pada masa lalu, sehingga terjadi kerusakan yang cukup parah. Oleh karenanya, perlu keseimbangan dalam pemanfaatan sumberdaya alam, dimana pemanfaatan sumberdaya alam sebaiknya lebih diorientasikan sumberdaya alam yang masih mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Permasalahan lain yang perlu diantisipasi adalah penguasaan lahan yang luas oleh perusahaan besar diperkirakan dapat menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam.

### **Perkiraan Keberhasilan**

Melalui penataan kembali instrumen perekonomian daerah, dalam jangka waktu 20 tahun ke depan diperkirakan akan terjadi peningkatan investasi yang dapat memunculkan sektor ekonomi produktif dan mendorong sektor riil. Disamping itu, pengelolaan kekayaan sumber daya alam yang masih prospektif untuk dikembangkan di sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan diyakini berperan besar dalam mendorong perluasan investasi maupun pengembangan produk unggulan daerah. Pada tahap selanjutnya, perekonomian daerah akan semakin dinamis seiring dengan peningkatan kegiatan investasi dan meningkatnya hasil produksi. Posisi daerah yang cukup strategis, baik ditinjau dari aspek pasar dan transportasi, akan memposisikan pengembangan kegiatan perkebunan dan pertambangan akan semakin menjadi daya tarik bagi pengembangan perekonomian daerah berbasis pemanfaatan kekayaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yang masih produktif diyakini akan mampu menggalakkan kembali kegiatan investasi dan kegiatan industri pengolahan. Implikasi selanjutnya, akan terjadi pertumbuhan beberapa sektor yang diprediksikan dapat menghasilkan produk unggulan, berkembangnya usaha ekonomi masyarakat, dan semakin terbukanya kesempatan kerja. Pada akhirnya, 20 tahun mendatang akan terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat dan berkurangnya penduduk miskin serta berkurangnya jumlah tenaga produktif yang menganggur.

### **Prediksi Output**

Berbagai langkah kebijakan untuk meningkatkan investasi di berbagai sektor akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara bertahap hingga tercapai pertumbuhan ekonomi yang mantap sampai tahun 2025. Mantapnya pertumbuhan ekonomi daerah diperkirakan akan menjadikan PDRB per kapita pada tahun 2025 meningkat sekitar 2,5 kali dibandingkan dengan Tahun 2004.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi pada akhir periode 2025 terutama didorong oleh pertumbuhan sektor bangunan, sektor transportasi dan komunikasi, serta sektor listrik, gas dan air minum, yang tumbuh rata-rata di atas 5 %. Meskipun pertumbuhan sektor pertanian masih di bawah 5 %, namun diperkirakan kontribusi sektor pertanian menjadi 32,50 % pada tahun 2025.

Pengelolaan sumber daya alam terutama pemanfaatan lahan potensial di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan diprediksi akan mampu meningkatkan hasil produksi pertanian dan perkebunan dan meningkatnya hasil hutan non kayu, yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan sektor industri pengolahan dan sektor terkait lainnya. Dampak berikutnya dari perluasan investasi di berbagai sektor produktif jelas akan mendorong terciptanya peluang kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat daerah dan semakin kuatnya ketahanan ekonomi masyarakat dan membaiknya pendapatan petani.

### **Sosial Budaya dan Politik**

Secara umum Masyarakat Kabupaten Sintang telah memasuki masa transisi antar dua budaya, budaya lokal dan budaya global. Di satu sisi mereka mulai meninggalkan budaya lokal yang sesungguhnya banyak yang bernilai positif, di sisi lain mereka terpukau dan tidak dapat menghindar dari era kesejagatan (globalisasi), ditandai dengan derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi modern, membawa masuk nilai dan budaya asing yang sebenarnya ada yang bernilai positif dan ada pula yang tidak sesuai, bahkan berdampak negatif, terhadap kehidupan mereka. Di balik itu masih tampak belum optimalnya pengelolaan keragaman budaya, kekayaan budaya, dan kekayaan alam sehingga belum besar perannya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun berada dalam masa transisi budaya, masyarakat Kabupaten Sintang tetap masih religius yang tercermin pada penganut tiga agama

besar dalam proporsi yang hampir seimbang, yaitu Islam (243.622 jiwa/44,49%), Katholik (149.970 jiwa/32,08%), dan Protestan (100.793 jiwa/21,91%), kemudian pemeluk agama Hindu sebanyak 2.484 jiwa dan Budha 4.464 jiwa (*Kalimantan Barat Dalam Angka*, 2003:124-125). Kehidupan beragama mereka relatif baik, meskipun pada umumnya masih dalam taraf pemahaman, penghayatan dan pengamalan yang bersahaja. Hal ini terjadi karena masih kurangnya sarana, prasarana, dan tenaga penyuluh/pembina kehidupan beragama serta belum optimalnya peran lembaga keagamaan. Sebagai contoh jumlah guru agama SDN yang diperbantukan tahun 2000 baru berjumlah 185 orang terdiri dari Protestan 110 orang, Katolik 50 orang, dan Islam 25 orang (*Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang 2002-2006*:11). Sampai dengan tahun 2003 Penyuluh Agama Islam yang telah ada berjumlah 196 orang, Penyuluh Agama Katolik 21 orang, Penyuluh Agama Protestan 17 orang, Penyuluh Agama Hindu 1 orang, dan Penyuluh Agama Budha masih belum ada (*Kabupaten Sintang Dalam Angka 2003*:92). Di sisi lain terjadi peningkatan jumlah kejahatan dan pelanggaran terhadap hukum dan norma agama.

Selain itu, para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Sintang juga mengalami kenaikan. Menurut catatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sintang jumlah Penyandang Cacat, Tuna Susila, Bekas Narapidana, dan Anak Nakal tahun 2003 bertambah sebesar 34,92% dibandingkan tahun sebelumnya. Sampai dengan tahun 2003 terdapat Penderita Cacat 1.347 orang, Wanita Rawan Sosial Ekonomi 912 orang, Korban Bencana Alam 3.320 orang, WTS 176 orang, dan Anak Nakal 22 orang, sehingga total penyandang masalah-masalah sosial di Kabupaten Sintang berjumlah 5.777 orang. Sebaliknya dalam hal dana, sarana dan prasarana pendukung program kesejahteraan sosial relatif mengalami penurunan. Menurut laporan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sintang, pada tahun 2003 realisasi santunan kepada fakir miskin/keluarga miskin tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 30.182 KK. Namun santunan untuk masyarakat terasing mengalami penurunan menjadi 1.486 KK (tahun 2002 sebanyak 1.658 KK), sedangkan santunan bagi wanita rawan sosial ekonomi turun drastis hanya 912 KK (tahun 2002 mencapai 3.886 KK).

Dalam konteks penyelenggaraan desentralisasi, saat ini Kabupaten Sintang dihadapkan pada masih rendahnya *capacity building*, rendahnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam membangun sinergisitas, dan masih rendahnya kapasitas keuangan daerah. Namun demikian secara umum kapasitas kelembagaan dan personil Pemerintah Kabupaten Sintang agak lebih jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di wilayah Timur. Sedangkan dalam bidang politik, kondisi saat ini belum optimalnya fungsi institusi politik dan komunikasi politik yang berada pada suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Budaya politik yang berkembang saat ini masih berlandaskan pada mengentalnya *political identity* yang didasarkan pada semangat primordialistik. Namun demikian keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, dan pemilihan Kepala Daerah secara langsung

menjadi modal politik utama bagi masyarakat untuk membangun kematangan demokrasi di daerah.

### **Perkiraan Peluang**

Pengembangan budaya memiliki peluang yang cukup baik berdasarkan kepada faktor-faktor indikatif antara lain: modernisasi, demokratisasi, revitalisasi budaya lokal, dan rehabilitasi kekayaan alam. Modernisasi sebagai bagian dari arus globalisasi yang bercirikan ilmu pengetahuan dan teknologi moderen memberikan nilai tambah bagi pola hidup dan budaya masyarakat, sehingga mereka relatif lebih rasional, dan mampu memenuhi standar kehidupan yang layak. Kemajuan ini sangat bermakna dalam memecahkan masalah kemajemukan budaya di Kabupaten Sintang secara logis dan ilmiah. Sedangkan demokratisasi, yang diwujudkan dalam pemerintahan otonomi daerah, memberikan peluang yang lebih besar terakomodirnya dan terbangunnya potensi-potensi sosial budaya dan hak-hak masyarakat dalam membangun dirinya dan lingkungannya. Keadaan ini telah berhasil membangkitkan semangat revitalisasi budaya sehingga kearifan dan kepemimpinan lokal berfungsi sebagai jiwa kebudayaan masyarakat. Sejalan dengan itu semua terbit kesadaran dari semua pihak akan perlunya rehabilitasi dan refungsionalisasi kekayaan alam sebagai bagian dari habitat budaya masyarakat. Ini semua diharapkan dapat memberikan peluang terjadinya transaksi interkolektivitas dan kontak antar budaya, sehingga terwujudnya suasana akulturasi yang positif dan atau budaya multikulturalisme yang menghargai secara setara semua kemajemukan yang ada dengan menghilangkan dominasi dan arogansi etnis atau budaya tertentu.

Modernisasi dan demokratisasi, ditambah dengan kecenderungan peningkatan kesadaran beragama pada masyarakat secara umum, juga memberikan peluang dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama. Modernisasi memberikan nilai tambah bagi pola hidup dan budaya masyarakat yang relatif lebih rasional, terdidik dan berwawasan luas. Sedangkan demokratisasi memberikan peluang dalam peningkatan pengamalan dan pembudayaan agama. Keadaan ini akan berhasil membangkitkan semangat revitalisasi dan reaktualisasi ajaran agama, norma dan moralitas keagamaan, serta pengabdian kepada nilai-nilai luhur. Sejalan dengan itu semua terjadi kecenderungan yang kuat terjadinya peningkatan kesadaran beragama pada masyarakat sebagai bagian dari upaya mereka mendapatkan pegangan yang kokoh dalam menghadapi masa depan yang kompleks dan semakin tidak pasti.

Semakin kondusif dan konsistennya demokratisasi pemerintahan, peningkatan ekonomi, dan kecenderungan peningkatan kepedulian sosial masyarakat seperti yang terlihat saat ini mengisyaratkan peluang yang optimistik bagi upaya Peningkatan kesejahteraan sosial di masa yang akan datang. Keadaan ini telah berhasil membangkitkan semangat kemandirian, produktivitas, dan kesetiakawanan sosial. Di samping itu komitmen pemerintah pusat untuk membangun kesejahteraan masyarakat tetap memberikan harapan seperti yang terlihat pada program kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak yang disalurkan melalui kegiatan santunan/bantuan langsung tunai bagi para penyandang masalah

kesejahteraan sosial. Kesetiakawanan sosial masyarakat bermunculan dengan berbagai bentuk wadah dan kinerjanya yang tidak hanya bersifat sosial semata-mata melainkan ada juga yang bersifat pemberdayaan, misalnya dalam bentuk mitra usaha, bantuan permodalan, dan bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi lainnya.

Selain itu, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di bawah UU No. 32 tahun 2004 membuka peluang yang sangat besar bagi penguatan politik masyarakat di tingkat lokal baik dalam proses rekrutmen kepemimpinan maupun dalam pembuatan kebijakan publik di daerah. Di dalam UU No. 32 tersebut kontrol rakyat atas pemerintahan diakomodasi melalui penguatan DPRD, sehingga ketidakseimbangan dalam hubungan pemerintah-masyarakat dapat dikurangi. Secara teoritis, penguatan DPRD membuka peluang bagi masyarakat agar lebih mampu memiliki jangkauan politik untuk terlibat secara pro-aktif dalam menentukan kebijakan publik, terlebih lagi misalnya, di dalam UU Pemerintahan Daerah tersebut prinsip-prinsip *good governance* yang memuat adanya akuntabilitas, transparansi, equality, dan partisipasi dijadikan sebagai asas dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal itu sudah barang tentu ke depan, akan membuka peluang semakin menguatnya posisi tawar-menawar masyarakat di daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta memberikan peluang yang cukup besar bagi penguatan desentralisasi dan demokrasi pada aras lokal dalam bentuk meningkatnya kesadaran politik masyarakat, terbangunnya iklim dan proses politik yang lebih demokratis dan meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam formulasi kebijakan di daerah.

### **Perkiraan Ancaman**

Dalam tinjauan sosial budaya pembangunan dapat berdampak positif dan negatif. Ancaman yang paling serius dalam pengembangan budaya adalah keracunan oleh budaya barat (westoksikasi), yang mewujudkan dalam bentuk bergesernya semangat pembangunan dan pemajuan dari modernisasi ke westernisasi (pembaratan). Westernisasi adalah sikap menerima kemajuan yang bias dari peradaban yang datang dari luar, terutama dari barat, sehingga hanya mengambil kulitnya dan mengabaikan substansinya, seperti mengambil budaya kebebasan yang sangat liberal, pemuasaan individual yang bersifat sesaat, dan pemenuhan keperluan hidup yang semata-mata bersifat kebendaan, namun mengabaikan budaya toleransi dan altruisme. Ancaman ini muncul sebagai dampak negatif daripada globalisasi, pembukaan dan pembangunan kawasan perbatasan dengan negara lain, kemajuan ekonomi, serta rendahnya sumber daya manusia masyarakat. Selain itu ancaman pembangunan sosial budaya juga muncul dari kondisi rusaknya habitat sosial ekonomi dan budaya masyarakat sebagai akibat eksploitasi yang tak terkendali terhadap sumber-sumber kekayaan budaya dan kekayaan alam oleh pihak-pihak yang hanya ingin mengejar kepentingan kekuasaan dan materi. Demikian pula sikap primordialisme sempit dan rasa ego etnisitas tertentu yang cenderung menampilkan sikap arogan yang berkelanjutan, meskipun pada mulanya dimaksudkan sebagai reaksi terhadap ketidakadilan tersebut.

Dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama, ancaman yang paling serius adalah politisasi agama, ekstrimisme penganut agama, dan pola hidup materialistik dan sekularistik. Politisasi agama yang terkadang bernuansa SARA sering muncul pada waktu adanya momentum politik yang melibatkan massa, baik di tingkat nasional maupun lokal, seperti pada saat pemilihan umum dsb. Ekstrimisme penganut agama lebih banyak muncul dalam bentuk-bentuk terorisme, ajaran sesat, serta kelompok sempalan yang eksklusif dan sejenisnya. Sedangkan pola hidup materialistik dan sekularistik lebih banyak disebabkan oleh modernisasi yang keliru dan bergeser menjadi westernisasi.

Di bidang peningkatan kesejahteraan sosial ancaman dapat terjadi karena beberapa keadaan, di antaranya: ketidakstabilan perekonomian dunia yang tercermin pada krisis harga minyak dunia, ketidakstabilan perekonomian nasional terutama karena hutang yang masih membebani anggaran negara serta mulai berkurangnya cadangan kekayaan negara dalam bentuk sumber daya alam, serta kesenjangan sosial-ekonomi yang masih terjadi di masyarakat. Semua keadaan ini tetap akan berlanjut dan pada tahap tertentu meningkat di masa-masa yang akan datang. Ancaman lainnya muncul sebagai dampak negatif daripada globalisasi, pembukaan dan pembangunan kawasan perbatasan dengan negara lain, serta pembangunan yang tidak merata dan serba terbatas. Keadaan ini dapat mengakibatkan para penyandang kesejahteraan sosial menjadi rentan bahkan menjadi korban pembangunan baik secara sosial, ekonomi, dan lainnya.

Pemberian otonomi yang luas kepada daerah sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam realitasnya memang membawa implikasi yang cukup signifikan bagi perkembangan dan dinamika politik di tingkat lokal. Transparansi dan demokratisasi dalam proses rekrutmen elit politik lokal, khususnya dalam pemilihan Bupati secara langsung yang pertama pada tahun 2005 di Kabupaten Sintang misalnya, telah menunjukkan perkembangan yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan masa pemerintahan Orba. Mulai bergulirnya proses demokrasi di tingkat lokal saat ini sudah barang tentu cukup memberikan arti penting bagi pemberdayaan masyarakat di daerah demi terwujudnya masyarakat sipil (*civil society*). Namun demikian, sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan kekuasaan dan kewenangan yang begitu besar kepada daerah, ternyata juga memunculkan sebuah fenomena sosial dan politik di Kabupaten Sintang yang bisa menjadi ancaman bagi penguatan demokrasi pada tingkat lokal, yaitu fenomena politik keetnisan, dimana terjadinya konsolidasi parameter-parameter primordialisme di dalam masing-masing lokalitas politik, yang memfasilitasi semakin berkembangnya semangat kedaerahan dan kesukuan dalam setiap proses rekrutmen elit politik di daerah.

Fakta menunjukkan, bahwa proses rekrutmen elit di daerah akhir-akhir ini semakin mengarah pada meluasnya penggunaan “putera daerah” sebagai parameter etnisitas yang membuat semakin mudarnya semangat nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Berbagai usaha untuk memiliki unit politik otonom yang dilakukan daerah, sekalipun berusaha di justifikasi

dengan alasan-alasan yang lebih fragmatis seperti pelayanan, kesejahteraan dan akselerasi pembangunan daerah, sesungguhnya menampilkan dirinya sebagai pergulatan etnis dan pembenaran atas kebangkitan politik kesukuan. Kondisi politik yang seperti ini sudah barang tentu bisa mengancam pembangunan demokrasi di Kabupaten Sintang dan berpotensi untuk memunculkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Secara teoritis, pembagian etnik yang mendalam dimobilisasi ke dalam politik pemilihan dan politik partai lebih cenderung menghasilkan kecurigaan ketimbang kepercayaan, polarisasi ketimbang perpaduan, dan menimbulkan pandangan yang sempit ketimbang toleransi.

### **Perkiraan Permasalahan**

Dalam wacana *global paradox* globalisasi akan melahirkan dua bentuk ideologi paradoksal yaitu internasionalisasi dan primordialisme lokal. Masyarakat Kabupaten Sintang telah memasuki masa transisi yang sulit antara dua budaya, yaitu budaya lokal dan global. Transisional inilah yang menyebabkan sebagian masyarakat di satu sisi tercerabut dari akar-akar budayanya dan menampilkan gejala kehilangan jati diri, dan di sisi lain menampilkan sikap anti modernisasi. Selain itu masih terus terjadi eksploitasi dan disfungsi kekayaan alam dan lingkungan sehingga masyarakat telah kehilangan habitat budayanya. Karena itu permasalahan yang paling mendasar di bidang pembangunan sosial budaya adalah bagaimana menyiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia masyarakat yang berkualitas sehingga mampu membangun jati diri mereka berdasarkan kepada budaya lokal dan global yang positif. Permasalahan lainnya adalah bagaimana membangun dan memfungsikan kembali kekayaan alam sebagai bagian dari habitat budaya masyarakat, serta diiringi dengan melestarikan peninggalan sejarah, seni budaya, dan kekayaan-kekayaan budaya lainnya.

Di bidang peningkatan kualitas kehidupan agama, permasalahan yang paling mendasar adalah bagaimana menyiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia masyarakat yang berkualitas di bidang agama sehingga mampu membangun jati diri mereka berdasarkan kepada budaya lokal dan global yang positif dan berlandaskan kepada norma ajaran agama yang mereka anut. Permasalahan lainnya adalah bagaimana membangun dan memfungsikan secara maksimal institusi keagamaan serta penyuluhan agama, sehingga agama dapat menjadi faktor pemersatu dan pemicu kemajuan dan dapat berfungsi sebagai tolok ukur dalam berpikir dan berperilaku.

Di bidang peningkatan kesejahteraan sosial ternyata ada kecenderungan para penyandang masalah kesejahteraan sosial mengalami kenaikan, demikian pula dengan bencana alam dan sejenisnya, sedangkan ketersediaan dana, sarana dan prasarana, serta tenaga relatif terbatas. Permasalahan yang paling mendasar di bidang ini adalah bagaimana terpenuhinya kebutuhan dasar yang memadai bagi para penyandang kesejahteraan sosial. Selain itu diperlukan upaya-upaya peningkatan sumber daya manusia masyarakat yang berkualitas terutama di bidang pelayanan kesejahteraan sosial sehingga mampu mengangkat harkat martabat dan jati diri mereka berdasarkan kepada standar kehidupan yang

layak sebagai warga negara Indonesia. Permasalahan lainnya adalah bagaimana mencegah terjadinya bencana alam, kebakaran hutan dan lahan, serta mengeliminir sedini mungkin benih-benih konflik yang dapat menimbulkan ketegangan dan keresahan di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat.

Berangkat dari kondisi dan permasalahan yang dihadapi saat ini, maka 20 tahun ke depan apabila tidak ada upaya yang optimal untuk melakukan penguatan demokrasi pada tingkat lokal dan terus untuk merivitalisasi penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah maka permasalahan yang akan dihadapi oleh Kabupaten Sintang 20 tahun ke depan adalah:

Apabila Institusi-institusi politik yang ada di daerah tidak mampu membangun komunikasi dan menjalankan fungsinya secara baik maka bisa diperkirakan bahwa institusi politik hanya akan menjadi arena kepentingan segelintir elit lokal untuk mencapai kepentingan pribadi dan kelompoknya. Komunikasi yang kurang berjalan secara baik akan bisa memunculkan disharmonisasi hubungan yang berimplikasi pada semakin terkotak-kotaknya elit lokal dan masyarakat pada kepentingan-kepentingan politik kelompok dan golongan.

Belum terbangunnya budaya politik yang demokratis dimasyarakat saat ini, apabila tidak dilakukan upaya-upaya yang menumbuhkembangkan kedewasaan politik, iklim dan proses politik yang demokratis maka bangunan politik yang didasarkan semangat primordialistik akan lebih mengental yang pada akhirnya kecurigaan dan ketegangan sosial politik akan tetap terus mengahantui dinamika politik di Kabupaten Sintang.

Ketidakmampuan dalam membangun sinergisitas antar kelembagaan dan antar daerah akan menimbulkan lemahnya koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta munculnya ego sektoral dan ego ke daerahan yang terlalu berlebihan.

Kekurangmampuan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang dalam membangun *capacity building* kelembagaan dan sumber daya aparatur pemerintahan daerah akan berdampak pada lambannya institusi dan aparatur dalam mangadaptasi sesuai dengan tuntutan otonomi daerah dan paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*.

### **Perkiraan Keberhasilan**

Pengembangan kebudayaan dimungkinkan akan berhasil apabila faktor-faktor penunjang yang kondusif dapat berjalan dengan baik, seperti semakin dekatnya pembangunan dengan masyarakat melalui otonomi daerah yang berazaskan kerakyatan, keseriusan pemerintah pusat untuk membangun kawasan perbatasan, dan pola pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang mengutamakan sinkronisasi.

Peningkatan kehidupan beragama besar kemungkinannya akan berhasil karena adanya faktor-faktor penunjang yang kondusif di masa-masa yang akan datang, seperti semakin kuatnya komitmen pemerintah pusat terhadap penegakan dan pengamalan ajaran agama, pemberantasan penyakit masyarakat (pekat), pembangunan sarana dan prasarana ibadah

dan pendidikan agama, serta peningkatan pelayanan dan bimbingan agama.

Peningkatan kesejahteraan sosial besar kemungkinannya akan berhasil karena adanya faktor-faktor utama yang kondusif, seperti semakin kuatnya komitmen pemerintah pusat untuk mensejahterakan masyarakat, semakin gencarnya penegakan hukum terutama terhadap para pelaku korupsi dan manipulasi yang merugikan rakyat dan negara, semakin meningkatnya usaha-usaha pemerintah dalam upaya pemberantasan penyakit-penyakit fisik dan sosial yang membahayakan masyarakat, membaiknya perekonomian negara, dan menguatnya kepedulian masyarakat terhadap korban bencana alam dan para penyandang masalah sosial lainnya.

Jika dibandingkan dengan daerah Kabupaten lainnya di wilayah selatan, Kabupaten Sintang untuk saat ini dinggap lebih maju dalam hal *capacity buildingnya*. Kelembagaan daerah yang dilihat dari perangkat dan struktur organisasi pemerintahan daerahnya sudah lebih baik dan sumber daya aparaturanya juga sudah cukup memadai jika dibandingkan dengan Kabupaten Kapuas Hulu, Melawi, Sekadau dan Sanggau. Dengan melihat berbagai faktor pendukung yang dimiliki oleh Kabupaten Sintang saat ini maka 20 tahun ke depan Kabupaten Sintang akan lebih mampu melakukan akselerasi pembangunan daerahnya.

Proyeksi keberhasilan tersebut di tandai:

Menjadi kabupaten yang akan mengalami kemajuan yang begitu cepat baik dari segi penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam akselerasi pembangunan wilayah dan pembangunan masyarakatnya jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di wilayah Timur. Hal ini dikarenakan dari sisi potensi SDA, infrastruktur, perangkat daerah dan kualitas sumber daya aparaturanya lebih baik

Pemerintah Kabupaten Sintang lebih mampu melakukan revitalisasi penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah. Oleh karena itu, konsepsi dari semangat Sintang Raya bukan mustahil akan menjadi sebuah kenyataan.

Dengan melihat berbagai keunggulan dan kelebihan yang dimiliki oleh Kabupaten Sintang saat ini, tidak menutup kemungkinan Kabupaten Sintang akan menjadi dinamisator utama dalam mendorong akselerasi terwujudnya Provinsi baru di wilayah Timur, dan Sintang lebih siap untuk menjadi Ibu Kota Provinsi baru tersebut.

### **Prediksi Output**

Dengan melihat proyeksi peluang, ancaman, masalah, dan keberhasilan Kabupaten Sintang di bidang sosial budaya dan politik dalam kurun waktu 20 tahun ke depan maka *out put* dari bidang pembangunan budaya dapat dikatakan bahwa dalam jangka waktu 20 tahun ke depan, Kabupaten Sintang akan mencapai jumlah penduduk yang semakin besar dan relatif memadai. Meskipun demikian pengendalian pertumbuhan penduduk yang seimbang perlu ditingkatkan agar lebih terbina secara baik, dengan sasaran terwujudnya jumlah usia produktif yang lebih besar daripada jumlah usia non-produktif, didukung persebaran yang relatif merata di seluruh wilayah

Sintang. Selain itu harus ada upaya untuk menumbuhkan kultur mandiri, kreatif-inovatif, dan rasa nasionalisme yang tinggi.

Masyarakat Sintang akan menjadi masyarakat global sebagai pengaruh daripada modernisasi dan pembangunan kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Ciri-cirinya adalah pluralitas yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan, lebih terbuka, dan tuntutan biaya hidup yang semakin tinggi. Ke depan, masyarakat Kabupaten Sintang akan menjadi masyarakat majemuk. Mereka harus dirancang untuk menjadi masyarakat multikultur yang dapat saling menghargai dan menghormati perbedaan dan kemajemukan budaya secara adil dan kesetaraan yang obyektif, tanpa adanya diskriminasi dan arogansi etnisitas tertentu.

Selain Heterogen secara budaya, Masyarakat Kabupaten Sintang juga akan heterogen dalam beragama. Religiusitas masyarakat harus didorong kepada sikap toleran, partisipatif, dan integratif. Peran luhur dari agama adalah sebagai faktor pengikat, pemersatu, dan pendorong (dinamisator) kemajuan yang berkualitas sehingga terwujudnya masyarakat yang memiliki kultur dan jatidiri agamis sekaligus pancasilais. Karena itu perhatian utama dalam peningkatan kehidupan beragama di masa yang akan datang dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang agama dan peningkatan fungsi dan kuantitas institusi agama, seperti tempat ibadah dan lembaga pendidikan agama, serta penyuluhan/pembinaan agama.

Dalam hal peningkatan kesejahteraan sosial dapat dirumuskan beberapa kegiatan pokok yang harus menjadi perhatian utama 20 tahun ke depan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas segala penunjang yang diperlukan seperti penyediaan dana, sarana dan prasarana yang memadai bagi para penyandang kesejahteraan sosial. Diperlukan pula upaya-upaya peningkatan sumber daya manusia PMKS yang berkualitas terutama di bidang yang berkaitan dengan pemenuhan kesejahteraan sosialnya sehingga mampu mengangkat harkat martabat dan jati diri mereka. Kegiatan lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah mencegah terjadinya bencana alam, kebakaran hutan dan lahan, serta mengeliminir sedini mungkin benih-benih konflik.

Sedangkan *output* dari revitalisasi desentralisasi dan penguatan demokrasi di Kabupaten Sintang tersebut adalah: Kabupaten Sintang memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi sebuah Kabupaten yang cukup maju dan berkembang jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di wilayah Timur. Hal ini di dasarkan pada berbagai potensi yang dimiliki daerah ini baik dari segi SDA, semakin baiknya komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sumber daya manusia daerahnya dan khususnya sumber daya aparaturnya, perangkat struktur kelembagaan dan infrastruktur perkantoran yang sudah cukup memadai. Berbagai potensi yang dimiliki tersebut, manakala dikelola secara baik dan benar, dan di dukung oleh semakin dewasanya elit politik lokal dalam berdemokrasi serta sudah semakin tingginya kesadaran politik masyarakat, maka ke depan akan bisa mengantarkan masyarakat Kabupaten Sintang lebih maju, mandiri dan sejahtera.

## **Prasarana dan Sarana**

Masih adanya wilayah yang terisolir dan tertinggal di Kabupaten Sintang merupakan indikasi bahwa kondisi infrastruktur tidaklah begitu menggembirakan, terutama infrastruktur dasar seperti halnya sarana & prasarana transportasi (jalan dan jembatan), air bersih, telekomunikasi dan kelistrikan. Menurunnya kemampuan transportasi sungai akibat terjadinya sedimentasi & kekeringan juga mulai terlihat di beberapa wilayah. Meski tidak ada masalah dalam transportasi darat antara Kota Sintang ke Pontianak ataupun ke kota lainnya, namun merosotnya penggunaan transportasi udara secara tidak langsung akan merugikan Kabupaten Sintang sebagai salah satu pintu gerbang wilayah pedalaman Kalimantan Barat.

## **Perkiraan Peluang**

Peluang terbesar bagi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sintang adalah masih adanya kawasan yang memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Peluang ini sudah seharusnya dimanfaatkan sehingga dapat menarik investor ke wilayah ini seperti pada kawasan Ketungau Hulu & Tengah yang merupakan wilayah perbatasan. Adanya kebijakan dan komitmen pemerintah untuk menggerakkan perekonomian di daerah perbatasan, menyebabkan kawasan ini menjadi sangat menarik, baik bagi investor luar maupun lokal.

Kawasan lain yang juga berpotensi adalah wilayah Ambalau dimana di daerah ini menyimpan potensi tenaga air yang besar yang konon dapat dijadikan andalan Kabupaten Sintang (dan mungkin juga seluruh Kalimantan Barat) untuk tenaga listrik.

## **Perkiraan Ancaman**

Perkembangan pesat wilayah-wilayah yang cepat tumbuh yang tidak terkendali, dapat menjadi ancaman bagi pembangunan daerah pedalaman berupa semakin besarnya kesenjangan/ketimpangan antar wilayah.

Pembangunan infrastruktur juga mendapat ancaman dari proses/iklim pelelangan yang tidak sehat dimana kebanyakan investor ataupun kontraktor yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur kadangkala didominasi oleh mereka yang boleh dikatakan tidak profesional. Ancaman lainnya adalah masalah sosial & keamanan, disamping masalah ketidakpastian hukum.

## **Perkiraan Permasalahan**

Salah satu permasalahan mendasar pada pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sintang adalah minimnya kontraktor/investor yang profesional. Ini disebabkan oleh banyak hal seperti terbatasnya dana maupun rendahnya kualitas SDM.

Sedang dari sisi pemerintah, permasalahan yang mungkin terjadi adalah akibat kurangnya *database* potensi kawasan. PAD Kabupaten Sintang yang cukup rendah, merupakan salah satu masalah mendasar yang menyebabkan sebagian besar pembiayaan proyek masih tergantung

pembiayaan dari pusat. Ini akan menyebabkan timbulnya ketidakpastian kelanjutan proyek yang sudah ada. Masalah lainnya adalah karena kawasan yang akan dikembangkan adalah kawasan yang masih terisolir, maka biaya operasi (*overhead*) sewaktu pelaksanaan proyek menjadi tinggi.

### **Perkiraan Keberhasilan**

Keberhasilan pembangunan infrastruktur yang akan dicapai sangat ditentukan adanya dukungan Pemda yang kuat disamping tentunya dukungan masyarakat. Transparansi dalam proses pelelangan & kejelian dalam memilih investor/kontraktor merupakan hal-hal positif yang dapat memperbesar keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur.

### **Prediksi Output**

Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sintang untuk dua puluh tahun mendatang sangat dipengaruhi oleh adanya transparansi dalam pelelangan, dukungan yang kuat dari Pemda & masyarakat, ketersediaan data pendukung yang lengkap, dan adanya kepastian hukum. Kesemua ini akan menyebabkan investor menjadi tertarik dan wilayah yang mulanya terisolir dan tertinggal akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang baru.

### **Pemerintahan**

Kondisi umum struktur kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Sintang secara struktural per eselon sudah cukup memadai, namun dari jumlah pegawai yang mengikuti Diklat atau kursus ketrampilan dan tugas belajar pada bidang-bidang yang bersifat pengembangan kompetensi dan teknis masih kurang memadai jika dibandingkan dengan tenaga teknis yang dibutuhkan. Penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yang berbasis pada *electronic government system* dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) juga belum sepenuhnya mampu diimplementasikan dengan baik. Namun demikian, secara umum penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sintang secara bertahap sudah berjalan dengan baik, hal ini didukung oleh infrastruktur pemerintahan daerah dan ketersediaan sumber daya aparatur yang lebih memadai.

### **Perkiraan Peluang**

Kehadiran UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah menawarkan berbagai paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana termuat di dalam asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan. Momentum tersebut membuka peluang bagi daerah untuk menata kembali sistem pemerintahan daerahnya. Dengan melihat kondisi obyektif pemerintah saat ini maka 20 tahun ke depan Pemerintah Kabupaten Sintang akan berpeluang:

Menjadi sebuah pemerintahan daerah yang mampu secara cepat untuk membangun sebuah organisasi pemerintahan yang sesuai dengan format dan tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah.

Mampu membangun manajemen pemerintahan yang lebih partisipatif, transparansi dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Dapat lebih mengarahkan administrasi pemerintahan daerah menjadi lebih fleksibel, inovatif, dan kreatif.

Menjadi pusat ibu kota provinsi wilayah timur, apabila pembentukan provinsi di wilayah timur terwujud.

### **Perkiraan Ancaman**

Dengan melihat kondisi saat ini dan kecendrungan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sintang, maka perkiraan ancaman 20 tahun ke depan dalam bidang pemerintahan adalah:

Manajemen pemerintahan daerah ke depan bisa memunculkan inefisiensi dan inefektivitas dan ketidakadilan baru di daerah.

Kualitas Sumber Daya Aparatur daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi baru sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik masih belum berubah sehingga berpengaruh pada budaya kerja yang kurang kreatif, inovatif, dan lebih produktif.

Data base Manajemen Sistem administrasi pemerintahan daerah dan kepegawaian belum sepenuhnya mampu mengarah ke sistem *electronic government*.

Ketimpangan persebaran Sumber Daya Aparatur yang berkualitas di antara masing-masing lembaga daerah.

Semangat etnisitas dan primordialistik yang merambah pada birokrasi pemerintahan daerah akan merusak sistem penjenjangan karier dan profesionalisme aparatur di daerah.

### **Perkiraan Permasalahan**

Penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka desentralisasi merupakan suatu pekerjaan yang kompleks dan berkesinambungan, sehingga dalam proses implementasinya memunculkan beberapa permasalahan baru yang berkaitan dengan kemampuan dari institusi pemerintahan daerah yang memperoleh transfer kewenangan untuk mengelolanya secara baik dan benar. Adapun beberapa permasalahan untuk 20 tahun ke depan dalam bidang pemerintahan adalah:

Manajemen pemerintahan daerah yang kurang mampu mengadaptasi sesuai dengan tuntutan paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan daerah akan memunculkan inefisiensi dan inefektivitas dan ketidakadilan baru di daerah

Kekurangmampuan Sumber Daya Aparatur daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi baru sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan prinsip-

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan merubah budaya kerja yang lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif.

Sistem administrasi pemerintahan daerah dan kepegawaian belum menjadi data base yang disusun secara digital dan ditangani oleh unit tersendiri pada struktur organisasi pemerintahan daerah.

Terjadinya ketimpangan persebaran Sumber Daya Aparatur yang berkualitas di antara masing-masing lembaga daerah akan menjadi masalah berkelanjutan, karena keterbatasan dana untuk peningkatan kualitas sumber daya aparturnya.

Prinsip-prinsip *good governance* belum mampu diselaraskan dengan formulasi kebijakan melalui *public meeting*, *public hearing*, dan wadah forum stake holder di daerah.

Fenomena etnisitas dan semangat primordialistik sudah memasuki ranah birokrasi pemerintahan daerah.

### **Perkiraan Keberhasilan**

Dengan melihat kondisi saat ini di mana pemerintahan daerah Kabupaten Sintang telah memiliki *capacity building* yang cukup baik jika dibandingkan dengan daerah Kabupaten lainnya diwilayah Timur, maka perkiraan keberhasilan 20 tahun ke depan dalam bidang pemerintahan adalah:

Manajemen pemerintahan daerah Kabupaten Sintang mampu mengadaptasi sesuai dengan tuntutan paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sumber Daya Aparatur daerah mampu menjalankan tugas dan fungsi baru sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan sudah terbangunnya budaya kerja yang lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif.

Sistem administrasi pemerintahan daerah dan kepegawaian sudah mampu menyesuaikan dengan tuntutan global dan sistem e-government.

Terjadinya persebaran Sumber Daya Aparatur yang berkualitas di antara masing-masing lembaga daerah.

Prinsip-prinsip *good governance* sudah mampu diselaraskan dengan formulasi kebijakan melalui *public meeting*, *public hearing*, dan wadah forum *stakeholder* di daerah.

### **Prediksi Output**

Pembangunan di bidang aparatur pemerintah daerah diperkirakan mengarah kepada aparatur yang lebih profesional dan sistem pemerintahan daerah yang didukung oleh sistem *e-government* serta aparatur yang berbasis moralitas. Mekanisme kinerja aparatur akan mengarah ke arah akuntabilitas publik dan transparansi sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government*, oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah diprediksikan mengarah kepada kepentingan publik dengan titik sasarannya adalah pemberdayaan

masyarakat. Prinsip penyusunan kebijakan publik yang transparan dan partisipatif menjadi isu dan pertimbangan utama bagi pemerintahan daerah.

Kinerja sistem dan manajemen pemerintah daerah akan mengarah kepada sistem digital yang tersistem melalui sistem informasi pelayanan publik yang sinergis antar sektor atau pelayanan yang prima yang akan menjadi model pelayanan publik yang dibutuhkan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah terpilih dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. Pada tingkat kelembagaan akan terbangun kerjasama antar elemen yang mengarah pada sinergisitas eksekutif, legislatif, dan elemen masyarakat dengan berdasarkan pada mekanisme interaksi daerah otonom membangun. Manakala manajemen pemerintahan daerah dilaksanakan dengan baik dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi maka pemerintah daerah Kabupaten Sintang akan mampu mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat.

### **Kamtibmas dan Hukum**

Pembangunan Kamtibmas berbanding lurus dengan pembangunan bidang hukum, karena salah satu tujuan dari penegakan hukum adalah terwujudnya ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun penegakan hukum tergantung beberapa faktor, yaitu: Peraturan perundang-undangan, kualitas penegak hukum, sarana dan prasarana dan tingkat kesadaran hukum masyarakat serta budaya setempat. Oleh karena itu, perkembangan berbagai faktor tersebut untuk kurun waktu duapuluh tahun kedepan perlu dianalisis secara komprehensif.

### **Perkiraan Peluang**

Adanya program peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pejabat TUN berkelanjutan yang dapat disinergikan dengan program nasional, yaitu Rencana Aksi Nasional HAM.

Sinergisnya tiga elemen merupakan komitmen semua pihak yang sudah diprogramkan di tingkat nasional dan provinsi.

Penegakan hukum integral secara bertahap antar Aparat Penegak Hukum yang sudah dirintis oleh pemerintah pusat dan akan berdampak ke Kabupaten Sintang.

Program SJDJ (Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah program nasional yang sumber pembiayaan dari APBN, sehingga Kabupaten Sintang dapat mensinergikan secara berkelanjutan.

Penyusunan perangkat peraturan perundang-undangan daerah yang mendukung kinerja kelembagaan, masih ada peluang, karena Program Legal Drafting Nasional menjadi program yang ditujukan untuk seluruh kabupaten.

Kesadaran Hukum sudah menjadi komitmen pemerintah pusat dan Provinsi Kalimantan Barat, sehingga peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur pemerintah daerah menjadi bagian program nasional dan rencana tindak provinsi.

Religiusitas masyarakat Kabupaten Sintang masih eksis sehingga penegakan hukum berbasis responsif dan moralitas kedepan menjadi relevan untuk dikembangkan.

Penyusunan draf kebijakan daerah khususnya penyusunan perda partisipatif di masa depan menjadi suatu keniscayaan, selaras dengan *Good Governance*.

Lembaga internasional yang bergerak dalam penegakan supremasi hukum membuka kemitraan dengan LSM daerah.

### **Perkiraan Ancaman**

Pengaruh globalisasi dan kecepatan informasi bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas kasus kejahatan, pelanggaran hukum, perbuatan amoral dari sisi kuantitas dan kualitas.

Kesepahaman yang berbasis supremasi hukum tidak mudah diwujudkan yaitu elemen kelembagaan, elemen kaedah peraturan (*instrumental*), elemen perilaku para subyek hukum, karena tetap menjadi ranah penafsiran yang dapat menimbulkan bias penafsiran.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum (SJDI) belum berjalan dengan baik, karena terbatasnya dana dan SDM kabupaten Sintang .

Perancangan kebijakan daerah (*legal drafting*) melalui pelatihan seringkali terlewatkan atau tidak dianggarkan secara berkelanjutan dalam perencanaan bidang pembangunan hukum.

Tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum masih belum pulih dan sosialisasi belum menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah.

Pemuka-pemuka agama belum difasilitasi untuk menjalin kebersamaan dalam penegakan hukum berbasis responsif dan moralitas.

Penyusunan produk hukum daerah (seperti PERDA) sejak awal tidak melibatkan masyarakat.

### **Perkiraan Permasalahan**

Terdapat peningkatan kasus kejahatan, pelanggaran hukum, perbuatan amoral dari sisi kuantitas dan kualitas.

Belum sinergisnya tiga elemen yang mendukung perwujudan ketertiban dan penegakan hukum, yaitu elemen kelembagaan, elemen kaedah peraturan (*instrumental*), dan elemen perilaku para subyek hukum.

Lemahnya data base karena Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) hukum belum berjalan dengan baik.

Kurangnya tenaga ahli dibidang Perancangan Kebijakan Daerah (*legal drafting*).

Masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, dan aparatur pemerintah daerah.

Masih belum efektifnya penegakan hukum berbasis responsif dan moralitas.

Penyusunan Produk Hukum daerah belum partisipatif dan transparan.

### **Perkiraan Keberhasilan**

Program nasional, yaitu Rencana Aksi nasional HAM menjadi payung kebijakan daerah yang dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pejabat TUN secara berkelanjutan.

Semakin kuat kesadaran semua pihak akan pentingnya perencanaan terpadu.

Penegakan hukum integral secara bertahap antar aparat penegak hukum yang sudah dirintis oleh pemerintah pusat dan provinsi akan berjalan secara berkelanjutan.

Terbangunnya SJDI (Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) dari pemerintah provinsi ke kabupaten secara on line.

Meningkatnya kualitas Sumber daya manusia sebagai ahli *Legal Drafting*

Meningkatnya kesadaran hukum berbagai elemen masyarakat dan aparat pemerintah

Kesadaran Religiusitas masyarakat semakin tumbuh, sehingga penegakan hukum berbasis responsif dan moralitas menjadi trend kedepan.

### **Prediksi Output**

Pada satu sisi pembangunan dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat mengalami peningkatan dari sisi kualitas dan kemungkinan besar diperkirakan menjadi prasyarat utama terhadap kinerja penyelenggaraan pembangunan dan pada sisi lain bersamaan dengan itu pembangunan dibidang hukum diperkirakan akan mengalami perubahan cara pandang, yaitu pembangunan hukum bersifat institusional dan bersifat responsif akan menuju pembangunan hukum berbasis moralitas dan religiusitas.

Diperkirakan juga terbentuknya Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum (JDIH) dari tingkat Propinsi ke Kabupaten dan pada sisi yang bersamaan juga ditandai meningkatnya kualitas pelanggaran hukum.

Kemudian dari sisi materi muatan peraturan perundang-undangan daerah diperkirakan akan terjadi keselarasan secara filosofis, yudiris dan sosiologis antara kebutuhan daerah otonom sebagai daya dukung terhadap pembangunan ekonomi dengan kebijakan daerah yang berbasis *good governance* dan *clean government*.

Pada sisi sumber daya manusia bidang hukum diperkirakan meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam legal drafting .

Demikian juga kesadaran hukum berbagai elemen masyarakat diperkirakan mengalami peningkatan yang signifikan dan selaras dengan implementasi kebijakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di daerah baik oleh pemerintah dan atau pemerintah provinsi.

## **PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH**

Mencermati kondisi geomorfologi Kabupaten Sintang saat ini, maka kegiatan perkebunan dan pertambangan merupakan kegiatan pertanian yang mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat untuk kurun waktu 20 tahun mendatang.

Dari aspek demografi, keberhasilan pembangunan bidang kesehatan akan menjadikan penduduk Sintang semakin berkualitas. Sementara itu, keberhasilan pembangunan keluarga berencana ikut berperan meningkatkan kualitas penduduk, dikarenakan struktur/komposisi penduduk menjadi semakin berimbang.

Dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi masa berikutnya, peningkatan investasi di berbagai sektor akan semakin memantapkan PDRB per kapita pada tahun 2025. Meski pertumbuhan pertumbuhan sektor pertanian masih di bawah 5 %, namun diperkirakan kontribusinya dalam PDRB Sintang masih cukup dominan (sekitar 32,50 %) pada tahun 2025. Ini dikarenakan pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan lahan potensial di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan masih mampu meningkatkan hasil produksi pertanian dan perkebunan dan meningkatnya hasil hutan non kayu, yang selanjutnya akan mendorong pertumbuhan sektor industri pengolahan dan sektor terkait lainnya.

Implikasi dari kemajuan bidang ekonomi dan mantapnya pengelolaan sumber daya alam dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja serta membaiknya pendapatan petani dan masyarakat.

Dalam tatanan perkembangan lingkungan eksternal, pengaruh dari modernisasi dan pembangunan kawasan perbatasan menjadikan terbiasanya masyarakat untuk menghadapi kemajemukan budaya, tanpa adanya diskriminasi arogansi etnisitas. Demikian pula halnya dengan peningkatan kehidupan beragama. Di masa mendatang, peningkatan fungsi dan kuantitas institusi agama akan dapat meningkatkan kualitas keagamaan maupun sosial kemasyarakatan, termasuk didalamnya peningkatan pemenuhan kesejahteraan sosial.

Konsolidasi revitalisasi dan desentralisasi diperkirakan akan menghasilkan sistem pemerintahan yang semakin baik serta memungkinkan terjadinya penguatan demokrasi di Kabupaten Sintang. Untuk merealisasikan harapan jangka panjang demikian, prasyaratnya adalah semakin baiknya kualitas sumber daya aparatur dan perangkat struktur kelembagaannya, serta semakin dewasanya elit politik lokal dan semakin tingginya kesadaran politik masyarakat dalam berdemokrasi.

Khusus untuk bidang infrastruktur, bilamana kebutuhan infrastuktur dasar telah mampu dipenuhi secara bertahap, maka dalam 20 tahun mendatang Kabupaten Sintang akan menjadi daerah yang diminati investor. Infrastruktur dasar yang memadai juga akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha yang produktif.

Dalam memfasilitasi kemajuan daerah, kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah daerah diprediksikan dapat membangun kerjasama dan

sinergitas antar elemen (eksekutif, legislatif, dunia usaha dan masyarakat) berdasarkan mekanisme interaksi daerah otonom membangun. Manakala manajemen pemerintahan daerah dilaksanakan dengan baik dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi maka pemerintah Kabupaten Sintang akan mampu mewujudkan harapan masyarakat.

Selanjutnya, pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang semakin kondusif diyakini akan mengubah cara pandang masyarakat untuk semakin responsif menuju pembangunan hukum berbasis moralitas dan relegiusitas. Untuk itu, secara bertahap perlu dipersiapkan peraturan daerah dan per-UU-an yang dapat memperkuat kebijakan daerah berbasis *good governance* dan *clean government*. Oleh karenanya, sumber daya manusia bidang hukum yang profesional menjadi syarat mutlak untuk merealisasikan pembangunan daerah berbasis hukum.

## **BAB III**

### **VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **3.1. VISI**

Berdasarkan kondisi, analisis dan prediksi kondisi umum daerah dengan mempertimbangkan proyeksi peluang, ancaman, permasalahan, dan keberhasilan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang, maka Visi pembangunan Kabupaten Sintang tahun 2006-2025 adalah:

#### **KABUPATEN SINTANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA TAHUN 2025**

Visi pembangunan Kabupaten Sintang tahun 2006-2025 ini mengarah pada pencapaian tujuan dari dibentuknya pemerintahan Kabupaten Sintang. Visi pembangunan tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat **kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan** yang ingin dicapai.

Ditinjau dari perkembangan ekonomi, kemajuan pembangunan daerah tercermin pada pencapaian laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan termasuk distribusinya. Lebih tinggi pendapatan rata-rata dan lebih merata distribusinya, suatu daerah dikatakan lebih makmur, dan dengan demikian daerah tersebut lebih maju.

Perekonomian daerah yang maju dapat diukur dari meningkatnya hasil produksi, meningkatnya investasi, dan meningkatnya kontribusi industri dalam perekonomian. Selain itu, dalam proses produksi berkembang keterpaduan antar sektor, terutama sektor pertanian, industri, dan perdagangan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien dan berwawasan lingkungan. Lembaga dan pranata ekonominya telah tersusun dan tertata, serta berfungsi dengan baik sehingga mendukung perekonomian daerah yang efisien dengan produktivitas yang tinggi. Daerah yang maju umumnya adalah daerah yang perekonomiannya stabil.

Selain diukur berdasarkan indikator ekonomi, tingkat kemajuan suatu daerah juga diukur berdasarkan berbagai indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya. Suatu daerah dikatakan makin maju apabila makin tinggi tingkat pendidikan penduduknya. Hal itu tercermin pada tingkat pendidikan terendah serta tingkat partisipasi anak usia sekolah.

Kemajuan juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, termasuk derajat kesehatan. Daerah yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, angka harapan hidup yang lebih tinggi, dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas SDM yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.

Selain memiliki indikator sosial ekonomi yang lebih baik, daerah yang maju juga telah memiliki sistem dan kelembagaan politik termasuk semakin optimalnya peran institusi hukum serta semakin efektifnya pelaksanaan

prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kabupaten Sintang yang ingin dibangun bukan hanya yang maju, tetapi juga mandiri. Kemandirian daerah berkaitan dengan kemampuan dan keleluasaan suatu daerah menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya, termasuk dalam hal pemanfaatan potensi sumber daya yang ada di daerah.

Daerah yang mandiri adalah daerah yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian daerah mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Dengan kemajuan ekonomi diharapkan suatu daerah dapat mengurangi ketergantungan keuangan dari luar daerah (Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota lain). Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan dan kemandirian.

Kabupaten Sintang yang ingin dibangun bukan hanya yang maju dan mandiri tetapi juga yang sejahtera. Kesejahteraan berkaitan dengan kelanjutan pencapaian kondisi yang diinginkan setelah dicapainya kemajuan dan kemandirian. Daerah yang sejahtera adalah daerah yang masyarakatnya telah mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai.

Kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan daerah tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

### **3.2. MISI**

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Sintang tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian yang maju dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, yang diorientasikan pada peningkatan kemampuan produksi pertanian dan perkebunan serta pengolahan hasil akhir produk, dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif untuk meningkatkan daya saing serta penguasaan dan pemanfaatan IPTEK.
3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang memadai untuk membuka kawasan terisolir dan tertinggal sekaligus untuk meningkatkan investasi.

4. Mewujudkan kemampuan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan memberikan perlindungan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeseimbangan, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
5. Mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan kesenjangan antar wilayah, penataan ruang dan pertanahan, percepatan pembangunan wilayah tertinggal/miskin dan pembangunan wilayah perbatasan antar negara (Serawak-Malaysia Timur).
6. Mewujudkan masyarakat yang bermoral, berbudaya, dan religius, serta memiliki kultur produktif-inovatif dan mandiri berlandaskan kepada nilai-nilai luhur Pancasila, budaya bangsa, dan agama/kepercayaan.
7. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat berbasis supremasi hukum dan tata pemerintahan yang baik
8. Mewujudkan budaya politik yang demokratis dan menghargai heterogenitas sosial dan politik dalam masyarakat.

### **3.3. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **3.3.1. Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang**

##### **3.3.1.1. Kaidah Pelayanan Umum Pemerintahan**

Secara umum kaedah pelayanan umum pemerintahan didasarkan pada :

1. Pengembangan Otonomi Daerah atau desentralisasi.
2. Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik ( *Good Governance* )
3. Kualitas Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat

**Kaedah Pertama**, Pengembangan Otonomi Daerah/Desentralisasi, secara normatif mengacu pada Penjelasan UU No. 25 / 2004 tentang semakin diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam NKRI. Demikian juga pada Bagian Umum Dasar Pemikiran UU No 32 Tahun 2004 dikemukakan bahwa “prinsip penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat”. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, maka Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan, disamping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantuan, dan evaluasi. Bersamaan dengan itu

Pemerintah Daerah wajib memberikan fasilitasi yang berupa peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada pelaksana pembangunan dan pemangku kepentingan agar dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Kaedah Kedua,** Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) merupakan prinsip dasar yang sudah disepakati secara internasional, nasional dan dikenali secara baik, diterapkan, menjadi kebiasaan dan sudah ada aturan yang menjamin. Prinsip *Good Governance* tersebut adalah: Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, Kesetaraan, Profesional, Berwawasan Visi-Misi, Responsibilitas, Pengawasan, Penegakan Hukum, Efisiensi dan Efektifitas.

**Kaedah Ketiga,** Kualitas Pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, merupakan pelayanan kepada masyarakat dan swasta yang diberikan oleh pemerintah daerah, lembaga publik atau lembaga swasta, baik yang berorientasi pelayanan (*service oriented*), berorientasi non profit (*cost oriented*) maupun berorientasi keuntungan (*profit oriented*) yang didukung oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem pelayanan terpadu. Pemberdayaan masyarakat merupakan issue yang muncul setelah otonomi daerah, sehingga jumlah unit kerja relatif berkurang baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Banyak urusan kemasyarakatan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah harus sudah diperankan oleh swasta dan masyarakat.

### **3.3.1.2. Strategi Pelayanan Umum Pemerintahan**

Pelayanan umum pemerintahan merupakan tugas dan fungsi utama pemerintah daerah yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan. Pelayanan umum tersebut menyangkut segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepada daerah. Dalam rangka mewujudkan pelayanan umum tersebut maka strategi yang dilakukan adalah:

- Menciptakan sistem pelayanan publik yang prima (*exellen service*) yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*.
- Peningkatan pelayanan publik yang profesional dicirikan oleh adanya akuntabilitas dengan sistem LAKIP dan responsibilitas dari aparatur pemerintah di daerah yang di dukung oleh penyiapan sumber daya aparatur yang handal, sarana dan prasarana kerja yang memadai, dan penerapan *reward and punishment* yang baik dan tepat.
- Menciptakan adanya kejelasan dan kepastian dalam pemberian pelayanan yang didasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan memperhatikan aspek persyaratan pelayanan, prosedur, unit kerja yang berwenang, dan rincian biaya serta waktu penyelesaian.

- Menciptakan pelayanan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien dalam bentuk peningkatan *delivery system*, Sistem Pelayanan Satu Atap (SIMPTAP), Sistem Pelayanan Satu Pintu (SIMPTU), *Electronic Government*, dan Sistem Informasi Pembangunan Kabupaten (SIMPEKAB).

### **3.3.1.3. Tolok Ukur Pelayanan Umum Pemerintahan**

Pelayanan Umum Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah adalah berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar; sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah (Penjelasan UU No 32 Tahun 2004).

Strategi Pelayanan Umum dalam Jangka Panjang dicapai dengan pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance, terutama prinsip transparansi, akuntabilitas publik, dan partisipatif dan tolok ukurnya antara lain:

**Pertama**, berdasarkan Prinsip *Good Governance*, dengan demikian setiap pelayanan akan dapat dilaksanakan, dianalisis dan dievaluasi secara jelas.

Tingkat keberhasilan dapat diukur dalam lima tahapan, yaitu:

1. Good Governance untuk kegiatan tertentu belum ada wacana dan belum dicoba diterapkan.
2. Good Governance untuk kegiatan tertentu sudah diwacanakan dan sudah dicoba diterapkan.
3. Good Governance untuk kegiatan tertentu sudah dicoba diterapkan dan berjalan baik.
4. Good Governance untuk kegiatan tertentu sudah diterapkan dan berjalan baik dan sudah menjadi kebiasaan.
5. Good Governance untuk kegiatan tertentu sudah diterapkan secara baik, menjadi kebiasaan dan ada aturan yang menjamin keberlangsungannya.

**Kedua**, berdasarkan Eksternalitas, pendekatan dalam pembagian pelayanan umum pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak atau akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pelayanan umum itu menjadi kewenangan kabupaten, apabila regional menjadi kewenangan propinsi dan apabila nasional menjadi kewenangan Pemerintah.

**Ketiga**, berdasarkan Akuntabilitas, pendekatan dalam pembagian pelayanan umum dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang

menangani sesuatu pelayanan umum adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari pelayanan umum yang ditangani tersebut. Dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin.

**Keempat**, berdasarkan efisiensi, pendekatan dalam pembagian pelayanan umum pemerintahan dengan mempertimbangkan sumber daya (personil, dan dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pelayanan umum.

**Kelima**, berdasarkan partisipatif dan transparansi, pendekatan pelaksanaan pelayanan umum didukung dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan mereka secara transparan adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Oleh karena itu kebijakan daerah yang menyangkut pelayanan umum harus disusun dengan melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

#### **3.3.1.4. Pelayanan Dasar Yang Menjadi Tanggung Jawab dan Kewajiban Pemerintah Daerah.**

Pelayanan dasar yang menjadi tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah Daerah seperti tercantum dalam Pasal 14 UU No 32 Tahun 2004 adalah berupa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang meliputi : (a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan, (b) Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, (c) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, (d) penyediaan sarana dan prasarana umum (e) penanganan bidang kesehatan, (f) Penyelenggaraan pendidikan (g) penanggulangan masalah sosial, (h) Pelayanan bidang ketenagakerjaan (i) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah (j). Pengendalian lingkungan hidup (k). Pelayanan pertanahan; (l) pelayanan kependudukan dan catatan sipil, (m) pelayanan administrasi umum pemerintahan (n) pelayanan administrasi penanaman modal (o) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan (p) urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai tingkat kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan yang diinginkan maka arah pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Daerah selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perekonomian Yang Maju Berlandaskan Perluasan Investasi Berbasis Agribisnis dan Pengembangan UMKM
  - Perekonomian daerah dikembangkan dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Percepatan laju pertumbuhan ekonomi ditempuh melalui peningkatan dan perluasan investasi pada sektor pertanian dan perkebunan, sekaligus meningkatkan

kemampuan pengolahan hasil produksi komoditi pertanian (agroindustri).

- Peningkatan dan perluasan investasi diarahkan untuk mendorong aktivitas sektor riil, mempercepat perbaikan dan pembangunan infrastruktur khususnya di perkotaan dan kawasan tertinggal/pedesaan, serta fasilitasi pembiayaan investasi di daerah.
- Peningkatan kegiatan industri dilakukan melalui pengembangan sub sistem industri hilir berbasis hasil pertanian dan perkebunan, mengembangkan industri penunjang termasuk industri kecil dan menengah untuk memperkuat diversifikasi produk industri, serta memperkuat basis produk industri daerah.
- Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja dilakukan dengan mendorong sektor ekonomi produktif yang mampu memperluas kesempatan kerja, menumbuhkan pola keterkaitan sektor yang mempunyai dampak pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
- Pengembangan ekonomi kerakyatan dilandaskan pada peningkatan usaha masyarakat yang produktif, peningkatan kemampuan kewirausahaan masyarakat, peningkatan peran koperasi dan UMKM, penataan dan penguatan manajemen usaha skala mikro dan usaha kecil, revitalisasi penyelenggaraan usaha dan perdagangan, menciptakan peluang usaha yang seluas-luasnya pada UMKM, serta memperluas akses koperasi dan UMKM kepada sumberdaya produktif.

## 2. Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat, Cerdas dan Produktif

- Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*)
- Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas manusia, sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat dan tanpa diskriminasi. Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang perlu disediakan secara bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.
- Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, serta mewujudkan Standard Pelayanan Minimal pada bidang kesehatan.

3. Mewujudkan Infrastruktur Dasar Yang Memadai

- Percepatan pembangunan transportasi diarahkan untuk membuka isolasi suatu wilayah, percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Dalam hal ini perlu penekanan secara khusus untuk wilayah perbatasan dan wilayah Timur, berhubung masih kurangnya sarana & prasarana transportasi di kedua wilayah tersebut sehingga belum bisa berperan sebagai pusat pemasaran & distribusi.
- Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan kepada penggunaan energi lokal seperti batubara dan tenaga air.
- Pengembangan & peningkatan mutu pelayanan pelabuhan udara sebagai pintu gerbang utama Kabupaten Sintang.
- Pengembangan & peningkatan armada angkutan sungai terutama di daerah yang angkutan daratnya masih terkendala.
- Selain oleh pemerintah, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendorong partisipasi swasta. Bentuk partisipasi swasta yang paling dianjurkan adalah investasi dalam bentuk privatisasi ataupun kerjasama (*partnerships*).

4. Mewujudkan Kemampuan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan

- Memperkuat sistem pembenihan/ pembibitan serta memantapkan pengembangan kawasan agribisnis terpadu, baik yang berbasis perkebunan, tanaman pangan, ternak maupun ikan.
- Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur dasar yang mendorong pengembangan produk unggulan perkebunan, pertanian tanaman pangan, peternakan, dan perikanan
- Mendorong pengembangan pertanian organik serta meningkatkan kapasitas produksi melalui ekstensifikasi, optimalisasi lahan dan peningkatan intensitas usahatani, dan pengembangan diversifikasi usahatani baik berdimensi vertikal maupun horizontal, serta meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui pasca panen, peningkatan mutu, pengolahan hasil dan pemasaran.
- Memperkuat usaha peternakan dan perikanan rakyat skala ekonomi berbasis sumber daya lokal dengan serta mengendalikan penyakit menular secara terpadu, melalui kegiatan penolakan, pengamatan, dan pencegahan.
- Memperkuat sistem informasi pertanian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertanian

- Mengembangkan dan memanfaatkan potensi hutan non kayu secara lebih efisien, optimal, adil, dan berkelanjutan.
- Mewujudkan unit-unit pengelolaan hutan produksi lestari dan memenuhi kaidah *sustainable forest management* (SFM) serta didukung oleh industri kehutanan yang kompetitif.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan, serta meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dalam proses penataan ruang, penggunaan dan perubahan peruntukan kawasan hutan.
- Pengembangan dan pembinaan industri kehutanan, serta pendataan, regulasi dan pengembangan produk hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan
- Meningkatkan dan mengembangkan hutan kemasyarakatan dan pembangunan hutan rakyat dan hutan tanaman industri (HTI) serta pemasaran produknya
- Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), mengembangkan rancangan pengelolaan DAS, memfasilitasi pengelolaan DAS bersama masyarakat, serta meningkatkan kerjasama dengan stakeholder dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat seperti membangun Hutan Adat
- Meningkatkan dan mengembangkan perlindungan serta pengembangan kawasan hutan guna memberantas perambahan, penebangan liar dan penanggulangan/pengendalian kebakaran hutan, sehingga diharapkan dapat menjamin keberadaan kawasan hutan
- Meningkatkan pembinaan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mencapai optimalisasi pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara melalui usaha pertambangan dengan prinsip *good mining practice*.
- Meningkatkan perlindungan dan konservasi SDA untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik.
- Melakukan rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA sebagai penyangga sistem kehidupan untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.
- Mengembangkan kapasitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik (*good environmental government*) berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.
- Meningkatkan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup.

- Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.
5. Mewujudkan Kemampuan Dalam Mengurangi Kesenjangan dan Kemiskinan
- Pembangunan daerah diorientasikan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.
  - Pengentasan kemiskinan diarahkan untuk memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin serta penguatan usaha ekonomi kecil menengah dan koperasi.
  - Menerapkan prinsip keadilan dan pemerataan, terutama untuk membuka keterisolasian wilayah, pemberdayaan potensi sumber daya wilayah yang memiliki keunggulan kompetitif, pengembangan kawasan cepat tumbuh dan strategis.
  - Percepatan pembangunan wilayah perbatasan.
  - Memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin melalui penyediaan pinjaman modal usaha, serta penguatan dan pengembangan lembaga keuangan mikro hingga ke pedesaan.
  - Memberikan akses yang adil dalam mendapatkan hak atas tanah dan pengelolaan SDA dengan memperkuat keberadaan dan peran kelembagaan masyarakat.
6. Mewujudkan Masyarakat Yang Bermoral, Berbudaya, Dan Religius
- Pembangunan dan pemantapan jatidiri masyarakat sebagai bagian dari jatidiri bangsa Indonesia. Upaya ini terutama ditempuh dengan memantapkan integrasi masyarakat berbasis multikulturalisme berdasarkan kepada ajaran agama, tata nilai dan adat istiadat budaya, serta peraturan yang berlaku secara harmonis, serasi, rukun dan damai.
  - Peningkatan budaya/kultur inovatif berdasarkan kepada khazanah budaya setempat, dan berorientasi kepada ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang beradab. Peningkatan ini dilakukan melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya masyarakat yang mempunyai potensi unggul diiringi dengan penerapan nilai-nilai modern dan ilmu pengetahuan yang relevan.
  - Perlindungan dan pemberdayaan yang adil dan obyektif terhadap semua potensi sosial dan budaya yang ada pada seluruh masyarakat. Perlindungan potensi sosial dan budaya diarahkan kepada upaya-upaya pelestarian, pemugaran, rekonstruksi, dan fungsionalisasi khazanah sosial dan budaya yang ada di masyarakat sebagai wadah kearifan lokal (*local*

*wisdom*). Sedangkan pemberdayaan potensi sosial dan budaya diarahkan kepada pengelolaan potensi pariwisata secara baik dan berwawasan lingkungan, serta pembinaan masyarakat terutama generasi mudanya melalui olah raga, seni, dan kegiatan budaya lainnya demi untuk keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat.

7. Mewujudkan Kamtibmas, Supremasi Hukum dan Tata Pemerintahan yang baik

- Peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum dan pemantapan kesadaran hukum masyarakat guna terciptanya keamanan dan ketertiban.
- Penyusunan Peraturan Daerah yang mendukung kinerja kelembagaan.
- Penyediaan sarana dan prasarana yang mendorong meningkatnya ketertiban dan penegakan hukum.
- Peningkatan kesadaran dan budaya hukum bagi aparat Pemerintah Daerah, Legislatif dan elemen-elemen masyarakat.
- Peningkatan kualitas SDM aparatur dan anggota DPRD guna memahami konsep *Good Governance*.
- Perbaikan sistem promosi dalam lingkup Pemerintah Daerah dan peningkatan kualitas anggota DPRD.
- Perwujudan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.
- Peningkatan kesejahteraan aparatur Pemerintahan Daerah.
- Perbaikan sistem pengarsipan dan pendataan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

8. Mewujudkan Budaya Politik Masyarakat Yang Demokratis dan Menghargai Keberagaman Sosial

- Peningkatan peran dan fungsi institusi politik dan komunikasi politik baik yang berada pada suprastruktur politik, infrastruktur politik dan antara komponen masyarakat yang ada di daerah.
- Perbaikan sistem koordinasi antar komponen masyarakat guna mewujudkan stabilitas daerah.
- Pemantapan pemahaman masyarakat tentang multikulturalisme, sehingga terimplementasikannya budaya politik yang demokratis, menjunjung tinggi hukum dan etika politik serta terbangun budaya untuk menghargai perbedaan.
- Pengembangan iklim dan proses politik yang demokratis sehingga memungkinkan semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi dan melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

### **3.3.2. Peran Sub-Wilayah Pembangunan**

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan/karakteristik daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan dan sumberdaya alam/fisik secara lokal. Orientasi ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang menuntut tumbuhnya inisiatif dan kreatifitas lokal dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan produktif.

Sejalan dengan pemikiran diatas dan untuk menjamin efektifitas pembangunan secara sistemik dan merata di kabupaten Sintang, maka implementasi kebijakan dan strategi pembangunan dilakukan dengan pendekatan kewilayahan baik sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi berlangsung atas kesamaan sifat geografi, sosial budaya dan wilayah sebagai satuan ruang ekonomi, maupun sebagai wilayah administratif perencanaan berdasarkan wilayah administratif pemerintahan.

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan pendekatan kewilayahan ini dapat dilakukan dengan : (a) Pendekatan pembangunan Sub-sub wilayah sebagai satu kesatuan ruang kegiatan ekonomi dan administratif perencanaan; (b) Pembangunan kawasan khusus perbatasan antar negara; (c) Pembangunan wilayah tertinggal dan Miskin; (d) Pembangunan wilayah cepat tumbuh dan strategis. Refleksi dari pendekatan kewilayahan ini dalam perencanaan dapat dikemukakan sebagai berikut :

#### **3.3.2.1. Sub-Sub Wilayah Pembangunan**

Pendekatan ini ditujukan untuk mengatasi ketimpangan wilayah dengan mengelompokkan beberapa pembangunan wilayah sebagai satu kesatuan ruang kegiatan ekonomi (kluster) yang mempunyai persamaan sifat dan letak geografi, persamaan potensi ekonomi yang dimiliki wilayah serta atas dasar pendekatan kewilayahan administratif perencanaan pembangunan. Berkaitan dengan itu, maka sub-wilayah pembangunan Kabupaten Sintang dibagi menjadi:

##### **3.3.2.1.1. Sub Wilayah Pembangunan (WP)1 Bagian Utara**

Sub wilayah ini terdiri dari kecamatan Ketungau Hulu, Kecamatan Ketungau Tengah dan kecamatan Ketungau Hilir. Wilayah ini pada umumnya memiliki potensi **sumberdaya mineral dan energi** yang cukup banyak sehingga sangat tepat apabila fokus pembangunan diarahkan pada pengembangan sektor pertambangan, perkebunan dan perdagangan. Locus pusat pengembangan wilayah pembangunan bagian utara adalah di kota Merakai.

##### **3.3.2.1.2. Sub Wilayah Pembangunan (WP) 2 Bagian Tengah**

Sub wilayah ini terdiri dari Kecamatan Sintang, kecamatan Binjai Hulu, Kecamatan Kelam Permai dan Kecamatan Dedai. Wilayah ini sangat

potensial untuk dikembangkan **sektor peternakan, pusat-pusat perdagangan, pendidikan, industri wisata**, dan kota sintang sebagai pusat pemerintahan. Locus pusat pengembangan adalah kota Sintang.

#### **3.3.2.1.3. Sub Wilayah Pembangunan (WP) 3 Bagian Barat**

Sub wilayah ini terdiri dari kecamatan Sungai Tebelian, Sepauk dan Tempunak. Wilayah ini sangat potensial untuk dikembangkan **sektor perkebunan dan sektor peternakan**. Locus pusat pengembangan di Nanga Sepauk.

#### **3.3.2.1.4. Sub Wilayah Pembangunan (WP) 4 Bagian Timur**

Sub wilayah ini terdiri dari kecamatan Kayan Hilir, Kayan Hulu, Serawai dan Ambalau. Wilayah ini sangat potensial untuk dikembangkan **sektor kehutanan, perkebunan dan pariwisata**. Locus pusat pengembangan di kota Serawai.

#### **3.3.2.2. Pembangunan Wilayah Perbatasan**

Pembangunan wilayah perbatasan sebagai salah satu pendekatan pengembangan pusat-pusat pembangunan kabupaten Sintang adalah sebagai implikasi perubahan paradigma pembangunan yang selama ini menempatkan wilayah perbatasan sebagai serambi belakang menjadi serambi depan. Perubahan ini memberikan implikasi ideologis, politis, sosial, ekonomi, budaya dan hukum.

Pembangunan wilayah perbatasan ditujukan untuk mengatasi ketimpangan wilayah, peningkatan taraf hidup masyarakat perbatasan, pemberantasan kegiatan ilegal dan kejahatan lainnya serta aspek pertahanan dan keamanan negara.

Untuk mengatasi kompleksitas permasalahan perbatasan harus dilakukan secara terpadu dan lintas sektor terutama yang bersifat ekonomi dan sosial, penyediaan infrastruktur dan menjadikan beberapa kawasan tertentu sebagai Pusat Pembangunan perbatasan (BDC)

Pembangunan Wilayah perbatasan ini meliputi wilayah lini I yaitu kecamatan Ketungau Hulu dan kecamatan Ketungau Tengah (terdiri dari desa Jasa, Nanga Bayan dan Desa Entel), untuk wilayah perbatasan lini II hanya terdiri dari kecamatan Ketungau Hilir.

##### **3.3.2.2.1. Pembangunan Wilayah Tertinggal dan Miskin**

Pengukuran wilayah tertinggal dilakukan dengan mempergunakan score penilaian berdasarkan kemampuan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, transportasi, sosial budaya, kependudukan dan pemerintahan.

Atas dasar perhitungan score penilaian dimaksud, maka dari 14 kecamatan terdapat 8 kecamatan dan 21 desa yang dikategorikan sangat tertinggal serta 6 kecamatan tergolong tertinggal sehingga perlu mendapatkan prioritas pembangunan. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah :

- a. Kecamatan Serawai dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 11.441 orang (53,93% dari jumlah penduduk kecamatan).
- b. Kecamatan Ambalau dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 5.179 orang (36,77% dari jumlah penduduk kecamatan).
- c. Kecamatan Kayan Hulu dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 7.328 orang (33,78% dari jumlah penduduk kecamatan).
- d. Kecamatan Kayan Hilir dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 6.181 orang (26,86% dari jumlah penduduk kecamatan).
- e. Kecamatan Sepauk dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 9.336 orang (22,46% dari jumlah penduduk kecamatan).
- f. Kecamatan Tempunak dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 24.016 orang (34,80% dari jumlah penduduk kecamatan).
- g. Kecamatan Sungai Tebelian dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 5.036 orang (19,34% dari jumlah penduduk kecamatan).
- h. Kecamatan Sintang dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 6.863 orang (13,35% dari jumlah penduduk kecamatan).
- i. Kecamatan Dedai dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 9.107 orang (36,75% dari jumlah penduduk kecamatan).
- j. Kecamatan Kelam Permai dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 7.002 orang (49,71% dari jumlah penduduk kecamatan).
- k. Kecamatan Binjai Hulu dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 3.979 orang (37,36% dari jumlah penduduk kecamatan).
- l. Kecamatan Ketungau Hilir dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 6.965 orang (36,50% dari jumlah penduduk kecamatan).
- m. Kecamatan Ketungau Tengah dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 12.741 orang (49,82% dari jumlah penduduk kecamatan).
- n. Kecamatan Ketungau Hulu dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 9.387 orang (51,50% dari jumlah penduduk kecamatan).

Pengembangan wilayah tertinggal/miskin selain dilakukan bersamaan dengan pendekatan pengembangan sub-sub wilayah seperti tersebut di atas, juga dilakukan dengan melaksanakan program khusus percepatan pengurangan ketimpangan wilayah dan kemiskinan antara lain dengan pemenuhan kebutuhan dan penyediaan infrastruktur dasar, pendidikan & kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan.

#### **3.3.2.2.2. Pembangunan Wilayah Cepat Tumbuh dan Strategis**

Kawasan cepat tumbuh dan strategis adalah kawasan yang perkembangannya secara fisik dan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir bergerak maju dengan cepat, baik sebagai pusat-pusat produksi komoditi, pusat pengolahan maupun sebagai pusat perdagangan, sedangkan sebagai wilayah strategis ia juga memiliki fungsi dan letak yang dapat memberikan akses distribusi dan pemasaran serta kepentingan lainnya.

Adapun wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam Kabupaten Sintang terdiri dari :

1. Kecamatan Sintang sebagai ibukota kabupaten memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dan fungsi kota yang terus meningkat sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan barang dan jasa serta pemberian akses pada daerah-kaerah lain, Hal ini menyebabkan kawasan tersebut memerlukan program khusus untuk mendukung dan mengendalikan perkembangan tersebut sehingga dapat memberikan kontribusi relatif besar terhadap pendapatan daerah.
2. Kecamatan Kelam, adalah kecamatan yang merupakan wilayah *hinterland* terdekat dengan Kota Sintang, sehingga kecamatan ini banyak menampung dan mendukung limpahan kegiatan ekonomi dan sosial, sehingga mendorong percepatan pertumbuhan di Ibukota Kecamatan Kelam yang secara bertepatan pula wilayah ini memiliki wilayah wisata alam dan historis "*Bukit Batu Kelam*" yang sudah mulai dikenal ke mancanegara. Dalam perkembangan selanjutnya kecamatan kelam dapat dipastikan akan menjadi kota satelit (*counter magnet*) bagi Kota Sintang.
3. Kecamatan Dedai adalah kecamatan yang sejak dulu telah dikembangkan dengan sektor perkebunan karet melalui pola perkebunan besar (Perusahaan Negara Perkebunan/Persero) dan pola perkebunan rakyat. Kondisi ini menyebabkan perkembangan kecamatan Dedai relatif lebih cepat setelah Kecamatan Sintang dan Kelam, selanjutnya kedepan perlu ditingkatkan potensi sumberdaya pembangunan yang telah dikembangkan menjadi komoditas/produk unggulan lokal yang mampu bersaing dipasaran global dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sintang Tahun 2006-2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan Kabupaten Sintang, merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 tahun ke depan. Disamping itu, RPJP ini merupakan koridor bagi calon Kepala Daerah dalam penyusunan visi, misi dan program.

RPJP Kabupaten Sintang ini juga menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sintang kurun waktu lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi: **KABUPATEN SINTANG MAJU, MANDIRI, dan SEJAHTERA TAHUN 2025** perlu didukung oleh: (1) Komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) Konsistensi kebijakan pemerintah; (3) Keberpihakan kepada rakyat; dan (4) Peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.